



**DINAMIKA MILITER INDONESIA DALAM
BIDANG SOSIAL POLITIK
TAHUN 1966-2004**

SKRIPSI

Oleh

**Holiq Sambudi
NIM 090210302085**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**DINAMIKA MILITER INDONESIA DALAM
BIDANG SOSIAL-POLITIK
TAHUN 1966-2004**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Pendidikan Sejarah dan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Oleh

Holiq Sambudi
NIM 090210302085

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Ayahanda Sukri dan Ibunda Satumi yang tercinta;
2. Guru-guruku sejak sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi;
3. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak memberikan bantuan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Segenap sahabat-sahabatku yang selalu mendukung dan selalu memberi semangat untuk masa depanku;
5. Almamater Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;

MOTTO

Bahwa Satu-satunya hak milik Nasional/Republik Indonesia yang masih utuh tidak berubah-ubah, meskipun harus mengalami segala macam persoalan dan perubahan hanyalah Angkatan Perang Republik Indonesia (Tentara Nasional Indonesia)

(*)

* Jendral soedirman

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Holiq Sambudi

NIM : 090210302085

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Dinamika Militer Indonesia Dalam Bidang sosial-politik Tahun 1966-2004” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2016

Yang menyatakan,

Holiq Sambudi

NIM 090210302085

SKRIPSI

**DINAMIKA MILITER INDONESIA DALAM
BIDANG SOSIAL-POLITIK
TAHUN 1966-2004**

Oleh

Holiq Sambudi
NIM 090210302085

Pembimbing:

Dosen Pembimbing 1 : Drs. Kayan Swastika, M. Si

Dosen Pembimbing 2 : Drs. Sumarjono, M. Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Dinamika Militer Indonesia Dalam Bidang sosial-politik Tahun 1966-2004” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Mei 2016

Tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Kayan Swastika, M. Si.
NIP. 19670210 200212 1 002

Drs. Sumarjono, M. Si
19580823 198702 1 001

Anggota I,

Anggota II,

Drs. H. Sugiyanto, M. Hum
NIP. 19570220 198503 1 003

Drs. H. Marjono, M. Hum
NIP. 19600422 198802 1 001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Prof. Dr. Sunardi, M. Pd
NIP. 195405011983031005

RINGKASAN

Dinamika Militer Indonesia Dalam Bidang Sosial-Politik Tahun 1966-2004; Holiq Sambudi, 090210302085; 2016: 81+XIII halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Pembentukan angkatan bersenjata di negara-negara modern ditujukan untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa suatu negara, begitu juga Negara Indonesia ini, dalam pembentukan angkatan bersenjata mempunyai dasar dan landasan yang tertera di undang-undang Militer Republik Indonesia tahun 1998, 2000 dan tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dinamika politik yang akan mewarnai politik pasca Soeharto adalah menurunnya keterlibatan langsung ABRI dalam politik. Sekurang-kurangnya secara formal, dengan demikian terdapat peluang bagi terciptanya semacam keseimbangan yang kondusif bagi kompetisi parpol dalam pemilu, tidak seperti praktek sebelumnya di mana militer senantiasa menjadi pendukung partai penguasa, Golkar, dengan dalih stabilitas dan komunitas pembangunan. Jika netralitas militer dapat diterapkan secara nyata selama pemilu, maka dapat mengembalikan kredibilitas politiknya yang selama beberapa bulan terakhir mengalami pemerosotan.

Dinamika Militer Indonesia dalam Bidang Sosial Politik Tahun 1966-2004 pada pelaksanaannya banyak mengalami perubahan. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tugas pokok dan fungsi militer di Indonesia tahun 1966-2004 ?; (2) Bagaimana peran militer Indonesia dalam bidang sosial politik tahun 1966-2004?. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Memahami tugas pokok dan fungsi militer Indonesia tahun 1966-2004. (2) Mendeskripsikan peran militer Indonesia dalam bidang sosial politik tahun 1966-2004. Manfaat dari penelitian ini adalah: (1) bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. (2) bagi

mahasiswa sejarah penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif untuk melihat dinamika perkembangan peranan militer dalam bidang sosial politik di Indonesia. (3) bagi peneliti sejarah penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya yang lebih luas dan mendalam untuk mengupas tema yang sama. (4) bagi Almamater penelitian ini merupakan salah satu perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Darma Penelitian dan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi kajian ilmu pengetahuan di perpustakaan pusat Universitas Jember.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari beberapa tahapan, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi dengan sifat penelitian kepustakaan. Langkah selanjutnya dengan melakukan kritik intern dan ekstern terhadap sumber dan data yang sudah dikumpulkan. Kemudian peneliti menghubungkan fakta-fakta yang sudah ditemukan dan dikritik menjadi sebuah kisah sejarah yang logis, kronologis dan sesuai dengan realitas. Langkah terakhir penulis melakukan historiografi yang bertujuan menerangkan adanya proses sebab akibat dari sejarah militer Indonesia secara kronologis dalam bentuk karya ilmiah skripsi.

Simpulan dari penelitian ini adalah Keterlibatan militer dalam peran sosial politik sudah dimulai sejak Indonesia merdeka. Dari perjalanan sejarah Indonesia, maka sangat jelas terlihat bahwa militer memiliki komitmen yang begitu kuat pada bidang sosial politik terutama pasca kemerdekaan. Di dalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945, tidak menyebutkan secara jelas dan tidak ada ketentuan yang mengharuskan Militer untuk mengatur dibidang hankam saja. Dengan demikian Militer dapat bergerak dibidang politik, sosial dan ekonomi.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dinamika Peranan Militer Di Indonesia Dalam Bidang sosial-politik Tahun 1966-2004”. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (SI) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Penulis pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Mohammad Hasan, M. Sc, Ph. D, selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Dr. Sunardi, M. Pd, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Dr. Sukidin, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Jember;
4. Dr. Nurul Umamah, M. Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Jember;
5. Drs. H. Marjono, M. Hum, selaku Ketua Laboratorium Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Jember;
6. Drs Kayan Swastika, M. Si, selaku Dosen Pembimbing I, Drs. Sumarjono M. Si, selaku Dosen Pembimbing II, Drs. H. Sugiyanto, M.Hum. selaku Dosen Penguji I, dan Drs. H. Marjono, M. Hum, selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini;
7. Drs. Sumarno, M. Pd, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;

8. Dosen-dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama perkuliahan;
9. Bapak Sukri dan Ibu Satumi, serta keluarga yang telah memberikan motivasi dan doanya demi terselesaikannya skripsi ini;
10. Sahabat-sahabat terbaik, Rengga Setya Budi, Sanja Kharis, Tibyan Hakim, Imam Sholihin, Sunarko, Ilham Fajar, Ibnul Fajar, Ahmad Muzlim, M. Zeni, Iwan Fals, Tegas Tiardana yang telah memberikan bantuan dan motivasi terima kasih atas segalanya.
11. Teman-teman kosan Batu Raden IX Viston, Setya Nugraha, Angga, Henry, yang telah memberikan dorongan/Semangat.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember,

2016

Penulis,

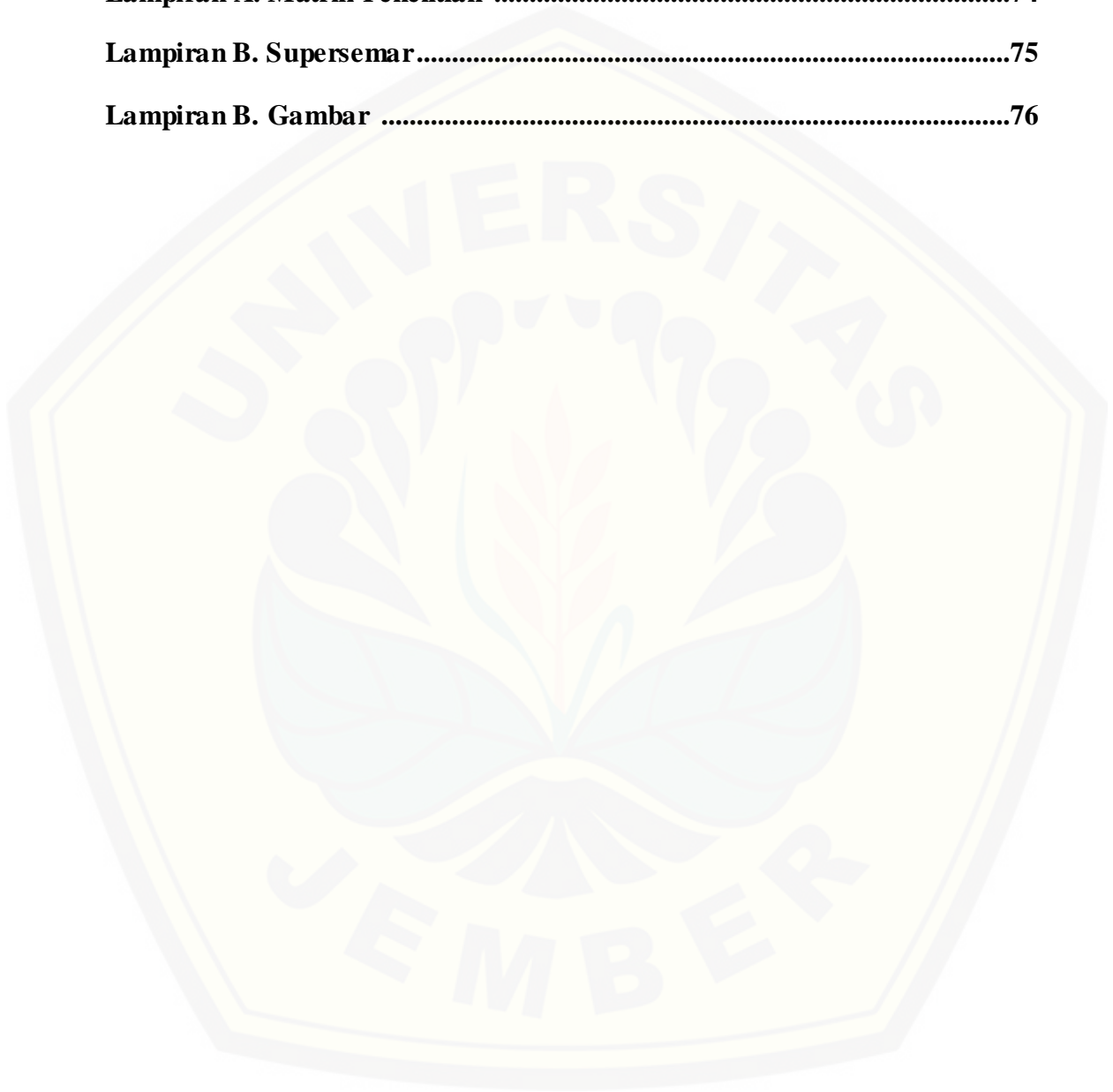
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Pengertian Judul	10
1.3 Ruang Lingkup	11
1.4 Rumusan Masalah	12
1.5 Tujuan Penelitian	12
1.6 Manfaat Penelitian	12

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	14
BAB 3. METODE PENELITIAN	23
BAB 4. DINAMIKA TUGAS POKOK DAN FUNGSI MILITER DI INDONESIA TAHUN 1966-2004	27
4.1 TUGAS Pokok dan Fungsi Militer di Indonesia Tahun 1966-2004	27
4.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Militer Pada Masa Orde Baru	31
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Militer Pada Masa Orde Baru	35
BAB 5. PERANAN MILITER DI INDONESIA TAHUN 1966-2004.....	40
5.1 Peran Militer di Indonesia Pada Era Orde Baru	40
5.1.1 Peran Militer pada ORBA Integrasi ABRI dan Dwi Fungsi ABRI	40
5.1.2 Langkah-langkah Pertama Pembangunan ABRI	44
5.1.3 Dwi Fungsi ABRI	46
5.2 Peranan Militer Indonesia Pada Era Reformasi.....	56
BAB 6. PENUTUP	65
6.1 Simpulam	65
6.2 Saran	67

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A. Matrik Penelitian	74
Lampiran B. Supersemar.....	75
Lampiran B. Gambar	76



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pembentukan angkatan bersenjata di negara-negara modern ditujukan untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa suatu negara, begitu juga Negara Indonesia ini, dalam pembentukan angkatan bersenjata mempunyai dasar dan landasan yang tertera di dalam undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia. Yang didalamnya terdapat penimbangan-penimbangan tentang pembentukan tentara Indonesia untuk membentuk undang-undang itu sendiri. Namun kenyataannya, terdapat beberapa perluasan peranan yang melekat pada angkatan bersenjata tersebut. Perluasan ini sangat terkait dengan perkembangan suatu negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengaruh militer dengan multi fungsinya dalam pemerintahan lebih disebabkan sejarah perjuangan bangsa dan negara yang bersangkutan, terutama di Indonesia.

Munculnya militer di Indonesia seiring dengan berdirinya negara Republik Indonesia. Dimulai BKR, TKR, TRI, dan sampai pergantian nama yang sekarang menjadi TNI. Sehari setelah pernyataan kemerdekaan Indonesia adalah awal kemunculan militer, dalam hal ini panitia persiapan kemerdekaan Indonesia mulai mengadakan tiga kali sidang pada tanggal 18, 19, 22 Agustus 1945 untuk membicarakan hal-hal yang urgen sehubungan dengan telah berdirinya republik Indonesia. Di antara sidang-sidang yang dilakukan, pada tanggal 22 Agustus 1945 berada dibawah Komite Nasional Indonesia, ditetapkan sebagai bagian dari badan penolong keluarga korban Perang (BPKKP) yang merupakan induk organisasi untuk memelihara keselamatan rakyat. Pembentukan BKR dimaksudkan oleh pemerintah agar tidak membangkitkan permusuhan dengan kekuatan-kekuatan asing yang saat itu masih ada di Indonesia. Orientasi ini pemerintah diwakili oleh Soekarno-Hatta, dengan menfokuskan pada politik diplomasi dalam perjuangan mempertahankan

kemerdekaan. Dalam pembentukan BKR ini ada permasalahan di kalangan pemuda dan pejuang Indonesia, ketidakpuasan para pemuda dan pejuang yang lebih berorientasi pada perlawanan dengan kekuatan bersenjata. Ditambah lagi dengan adanya tanggal 29 september mendarat lagi tentara Inggris yang dipimpin letnan jenderal Sir Philip Christison, panglima (AFNEI) dengan membawa pasukan Belanda di dalam (NICA) dan eksistensi kemerdekaan semakin hari semakin terancam kedudukannya oleh tentara Jepang yang masih menjaga status quo di daerah pendudukannya sehingga menimbulkan kekecewaan di kalangan bangsa Indonesia. Keadaan tersebut mendukung pemerintah untuk membentuk militer sebagai alat mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga dalam pembentukan tentara nasional Indonesia pada waktu itu diubah menjadi TKR (Nasution, 1968: 83).

Tanggal 25 Januari 1946 melalui Penetapan Pemerintah No: 4/S.D./1946 Tentara Keselamatan Rakyat (TKR) diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Tujuan perubahan ini adalah pemerintah ingin membentuk suatu alat ketentaraan yang sempurna dengan mengambil teladan dari bangsa lain. Namun karena masih adanya konflik antara tentara dengan laskar yang tidak mau meleburkan diri dalam TRI, maka presiden Soekarno pada tanggal 23 Februari 1946 menetapkan pembentukan panitia reorganisasi tentara. Banyak kesulitan yang dihadapi panitia, menyatukan pendapat dari sekian banyak orang dari lingkungan sosial dan pendidikan yang berbeda-beda. Baru setelah itu melalui dekrit presiden tanggal 7 Juni 1947 semua organisasi bersenjata dilebur menjadi satu kedalam TNI yang beranggotakan dari TRI, Laskar Perjuangan dan Pemuda Indonesia lainnya. Pada awal berdirinya TNI, susunan organisasinya tidak mengalami perubahan. Baru kemudian setelah terjadi Agresi Militer Belanda I tanggal 21 Juli 1947, susunan organisasi TNI mengalami perubahan. Susunan organisasi TNI diatur dengan penetapan presiden No 9 tanggal 27 Februari 1948, tentang Reorganisasi dan Rasionalisasi (Fattah, 2005:48).

Kelahiran dan pertumbuhan militer tersebut mengarahkan angkatan bersenjata Indonesia berperan dalam bidang sosial politik, disamping bidang pertahanan keamanan sehingga militer memiliki hak dan merasa wajib dalam menentukan haluan negara dan jalannya pemerintahan. Sebab pokok militer mempunyai dua fungsi yaitu sebagai kekuatan militer (pertahanan dan keamanan) yang merupakan alat negara dan sebagai kekuatan sosial politik yang merupakan alat perjuangan rakyat. Selain itu, Indonesia dikategorikan sebagai negara berkembang, pengendalian unsur kehidupan politik dan kehidupan masyarakat Indonesia oleh pemerintah sipil masih lemah. Hal itu seperti memberikan pengaruh psikologis dan moril kepada militer untuk berpartisipasi di dalam urusan-urusan politik (Muhaimin, 1982:11).

Secara Teoritis, keterlibatan militer dalam bidang politik disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: (1) Pertentangan sosial diantara kelompok-kelompok dan partai-partai yang memuncak. Kondisi tersebut membuat militer cenderung berperan dalam bidang stabilator, sehingga membawa keadaan yang kondusif untuk mengatasi disintegrasi bangsa, (2) Keadaan sosial yang dan kurangnya modernisasi secara ekstensif. Ini tertuju kepada elit politik yang hanya memikirkan kepentingan sendiri, sehingga militer lebih aktif berperan dalam pemerintahan sebagai wujud pembangunan disegala bidang, (3) Kemacetan ekonomi. Penumpukan krisis-krisis ekonomi merupakan sebab penting dari perebutan kekuasaan oleh kaum militer untuk mensejahterakan bangsa, (4) Korupsi merajalela, (5) Terancamnya kondisi persatuan nasional. Ini terkait pada situasi negara yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Oleh sebab itu, militer merasa memiliki memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai kekuatan pertahan dan keamanan (Schrool, 1981:185-186)

Dinamika politik yang akan mewarnai politik setelah lengsernya Orde Baru adalah menurunnya keterlibatan langsung ABRI dalam politik. Sekurangnya secara formal, dengan demikian terdapat peluang bagi terciptanya

semacam keseimbangan yang kondusif bagi kompetisi parpol dalam pemilu, tidak seperti praktek sebelumnya di mana militer senantiasa menjadi pendukung partai penguasa, Golkar, dengan dalih stabilitas dan komunitas pembangunan. Jika netralitas militer dapat diterapkan secara nyata selama pemilu, maka dapat mengembalikan kredibilitas politiknya yang selama beberapa bulan terakhir mengalami pemerosotan (Urbaningrum, 1999: 37)

Lebih dari itu, menyurutnya keterlibatan langsung ABRI dalam bidang sosial politik, tidak berarti Peranan sosial politik militer akan hilang, yang terjadi adalah transformasi bertahap di mana Peranan ABRI sebagai mitra koalisi dalam pembentukan pemerintah pasca pemilu masih akan sangat diperlukan. Konsekuensinya, jika pemenang pemilu adalah koalisi partai yang masih ingin mempertahankan *status quo* topangan ABRI terhadapnya akan menambah sulitnya proses redemokratisasi di masa depan. Jika sebaliknya yang terjadi, kendatipun pengaruh militer masih ada tetapi dapat diupayakan suatu penataan politik yang semakin melempangkan jalan bagi kehendak reformasi (Imawan, 1997: 53).

Ketika Habibie menggantikan Soeharto sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu terbesar yang harus dihadapinya. Isu-isu itu adalah (1) masa depan reformasi, (2) masa depan ABRI, (3) masa depan daerah-daerah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia, (4) masa depan Soeharto, keluarganya, kekayaan dan kroni-kroninya, dan (5) masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. 17 bulan kemudian, isu pertama menunjukkan perkembangan positif, isu kedua mengarah kepada pengurangan Peranan militer dalam bidang politik, isu ketiga telah terselesaikan dalam konteks Timor-Timor dan tidak dalam konteks daerah lain, isu keempat belum terselesaikan, dan isu kelima tetap tak terpecahkan. Habibie memulai masa jabatannya dengan suatu reputasi yang membuatnya tidak dipercayai oleh aktivis mahasiswa, militer, sayap politik utama, pemerintah asing, investor luar negeri dan

perusahaan internasional, namun mengingat krisis parah Indonesia dan posisi pribadinya, capaian Habibie tergolong luar biasa (Ricklefs, 2005:655-656).

Pada era kepemimpinan Abdur Rahman Wahid politik militer Indonesia mengalami perubahan dengan adanya supremasi sipil yang menjadi barak agenda politik terpenting militer Indonesia. Ini menjadi titik awal supremasi sipil setelah puluhan tahun berkuasanya rezim militer di Indonesia. Supremasi yang dilakukan Abdur Rahman Wahid tercermin dari beberapa hal. Pertama, kementerian pertahanan dipisahkan dari jabatan Panglima ABRI. Kedua, TNI dan Polri dipisahkan guna menegaskan batas antara pertahanan oleh TNI dan keamanan oleh Polri, sehingga ABRI tidak menjadi identitas tunggal. Ketiga, untuk pertama kalinya setelah beberapa dekade jabatan menteri pertahanan dipegang oleh orang sipil (Juwono Sudarsono, lalu dilanjutkan Mahfud MD). Keempat, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia Jabatan Panglima TNI dipegang oleh non angkatan darat. Sejak era Abdur Rahman Wahid, jabatan panglima TNI dijabat secara bergiliran oleh ketiga angkatan (Darat, Laut, Udara) (Ricklefs, 2005: 657).

Simbol dari adanya kebijakan supremasi sipil itu memuncak saat Abdur Rahman Wahid dengan sangat berani mencopot jenderal Wiranto sebagai Menkopolkam pada bulan Februari 2000. Ini langkah sangat berani karena Wiranto masih sangat berkuasa di tubuh militer. Harus di akui, hal ini yang menyebabkan terjadinya kejatuhan Abdur Rahman Wahid dari jabatan presiden RI yang ke Empat.

Secara umum, Dwifungsi ABRI menciptakan permasalahan-permasalahan dalam Negara, campur tangan militer dalam permasalahan politik, campur tangan militer dalam permasalahan-permasalahan negara lainnya yang penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dwi Fungsi ABRI dilihat sebagai sebuah intervensi militer dan legitimasi militer untuk melakukan tindak kekerasan terhadap rakyat. Dwi Fungsi berarti masuknya militer dalam posisi-

posisi/jabatan-jabatan penting dan mengurangi jatah orang-orang sipil. Keadaan demikian membuat masyarakat sipil/civil society mengalami kemandekan dalam pembinaan SDM, kaderisasi dan kepemimpinan. Sipil dianggap masih bodoh dan belum mampu memimpin atau mengelola negara. Sehingga terdapat tuntutan yang sekaligus menjadi agenda awal Reformasi adalah terciptanya persatuan dan kesatuan nasional, tegaknya kembali kedaulatan rakyat, pelaksanaan desentralisasi pemerintahan melalui otonomi daerah, melaksanakan pemilu yang Luber dan Jurdil guna mengakhiri masa pemerintahan transisi, penghapusan dwifungsi ABRI secara bertahap, mengusut pelaku KKN dengan diawali pengusutan KKN yang dilakukan oleh Soeharto dan kroninya, serta mendesak seluruh anggota Pam Swakarsa untuk membubarkan diri. (Ihsan, 2013: 238-239).

Demokratisasi politik tingkat nasional kemudian melahirkan produk regulasi politik dan kebijakan yang menata sistem keamanan nasional. Ini tercermin dalam langkah positif yang berarti berupa pemisahan TNI dan Polri, April 1999. Tindakan kepolisian akan lebih oleh aparat kepolisian tanpa harus khawatir dengan intervensi kepentingan militer. Kemajuan ini lalu diperkuat oleh TAP MPR No. VI Tahun 2000 dan TAP MPR No. VII Tahun 2000 yang mengatur tentang pemisahan Peranan TNI dan Polri. Pada tahun yang sama, dilakukan amandemen konstitusi UUD 1945, termasuk ketentuan pasal 30 mengenai pertahanan dan keamanan negara yang menegaskan pembedaan fungsi pertahanan dan keamanan. Langkah-langkah ini sempat menimbulkan polemik. Kepentingan pemisahan organisasi antara TNI dengan Polri adalah sesuatu yang mendesak. Namun sebagian kalangan menilai pemisahan tugas dan Peranan yang dikotomis antara pertahanan dan keamanan, berpotensi menimbulkan masalah, diantaranya kebingungan dalam menangani kejahatan transional dan potensi konflik antara personel Polri dan TNI di lapangan (Samego, 2000: 45).

Arus reformasi juga mulai mengurangi dominasi Angkatan Darat (AD) dalam TNI. Pada era Soeharto berkausa, jabatan Panglima TNI selalu berasal dari AD. Abdurrahman Wahid yang terpilih sebagai Presiden, mendobrak tradisi ini dengan mengangkat seorang Marsekal Angkatan Laut (AL) sebagai panglima TNI. Presiden Megawati Soekarnoputri yang menggantikan Abdurrahman Wahid membuat jabatan Panglima TNI diisi kembali dari AD. Di penghujung pemerintahan Megawati, Undang-undang 34/2004 tentang TNI disahkan dan menyatakan bahwa posisi Panglima TNI dijabat secara bergantian. Upaya melanjutkan kepemimpinan TNI di bawah Jendral (AD) Ryamizard Ryacaudu sempat memicu kontroversi, saat hasil pemilu 2004 Susilo Bambang Yudhoyono tetap memusatkan Marsekal TNI AU Djoko Suyatno Sebagai Panglima TNI (Sanit, 1998: 42).

Salah satu hal menarik untuk dibahas dari masalah diatas adalah dinamika militer indonesia dalam bidang sosial politik. Militer pada masa Orde Baru di indonesia lahir melalui proses sejarah yang panjang, setelah terjadinya proklamasi di Indonesia. Militer pada masa orde baru digunakan sebagai alat politik, yaitu dikenal dengan dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI memungkinkan pihak militer untuk terlibat dalam politik pemerintahan. Setelah rezim orde baru berakhir, dengan lahirnya sebuah era reformasi yang memberikan kebebasan seutuhnya dan demokrasi yang menyeluruh bagi rakyat Indonesia. Politik militer dwifungsi ABRI pada era orde baru dihapus di era reformasi. Sehingga militer tidak bisa ikut campur dalam urusan sosial politik pemerintahan.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis merasa tertarik untuk menggali lebih lanjut mengenai Dinamika Militer Indonesia dalam Bidang Sosial Politik Tahun (1966-2004). Selain itu penulis ingin menumbuhkan rasa menghargai pada masyarakat tentang sejarah militer sebagai alat negara dan sekaligus alat pejuang rakyat, agar legitimasi dari masyarakat semakin konkrit, utamanya peran

aktif militer dalam bidang sosial politik disamping peranan sebagai kekuatan pertahanan keamanan.

1.2 Penegasan Pengertian Judul

Penegasan pengertian judul dalam suatu penelitian sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan persepsi. Penulis merasa penting memberikan pengertian penegasan judul yang penulis buat yaitu “Dinamika Militer Indonesia dalam Bidang Sosial Politik Pada Tahun 1966-2004. Adapun istilah yang perlu penulis tegaskan dalam judul ini adalah:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989:206), dinamika merupakan kelompok gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang di masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam hidup masyarakat yang bersangkutan. Militer adalah sebuah organisasi yang paling sering melayani kepentingan umum tanpa menyertakan orang-orang yang menjadi sasaran usaha-usaha organisasi itu (Perlmutter, 1984: 2). Dalam penulisan ini terfokus pada Angkatan Darat, yang menjadi bagian dari kekuatan sosial politik, disamping kekuatan pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan pengertian dan pemaparan terkait judul di atas, yang dimaksud dengan Dinamika Militer Indonesia dalam Bidang Sosial Politik Tahun 1966-2004 adalah suatu gerakan perubahan yang dilakukan oleh militer untuk berpartisipasi menentukan kehidupan Negara dan jalannya pemerintahan tanpa menyampingkan tugasnya sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan (hankam), yang menyebabkan terjadinya dinamika perkembangan militer dalam bidang sosial politik.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dimaksudkan agar penelitian ini tidak menyimpang dari fokus permasalahan yang akan dibahas, hal ini perlu ditetapkan

batasan ruang lingkup, yang meliputi temporal (waktu) dan spasial (tempat) serta fokus pada kajian atau materi.

Penulisan ini mengambil ruang lingkup waktu dari tahun 1966-2004. Tahun 1966 dijadikan sebagai batas awal penelitian, karena tahun ini merupakan kelahiran Orde Baru dinamika militer dalam bidang sosial politik yang semakin luas di dalamnya sehingga dalam prakteknya cenderung menyimpang dari fungsi dan perannya sebagai alat negara dan pejuang rakyat ini tentunya berpengaruh pada profesionalitas militer. Sedangkan Tahun 2004 dijadikan batas akhir penelitian karena tahun ini merupakan batas akhir dari dinamika militer dalam bidang sosial politik sudah mulai berkurang dengan adanya penghapusan dwifungsi ABRI

Lingkup tempat dari penelitian ini, difokuskan pada negara Indonesia. Mengingat tatanan di bidang sosial politik pemerintahan Indonesia pada saat itu tidak menentu dibawa dinamika militer yang semakin luas didalamnya. Sedangkan lingkup permasalahannya penulis fokuskan latarbelakang keikutsertaan militer dalam bidang sosial politik Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, timbul beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika tugas pokok dan fungsi militer Indonesia tahun 1966-2004 ?
2. Bagaimana peran militer Indonesia dalam bidang sosial politik tahun 1966-2004?

1.5 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai tujuan karena dengan tujuan akan dapat diketahui maksud dan arah dari penelitian yang dilakukan. Berpijak pada perumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Memahami tugas pokok militer Indonesia dalam bidang sosial politik tahun 1966-2004.
2. Mendeskripsikan peran militer Indonesia dalam bidang sosial politik 1966-2004.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pembaca
penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Bagi Mahasiswa Sejarah
penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif untuk melihat dinamika perkembangan peranan militer dalam bidang sosial politik di Indonesia.
3. Bagi Peneliti Sejarah
penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya yang lebih luas dan mendalam untuk mengupas tema yang sama.
4. Bagi Almamater
penelitian ini merupakan salah satu perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Darma Penelitian dan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi kajian ilmu pengetahuan di perpustakaan pusat Universitas Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini mengemukakan tentang pendapat para ahli serta dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, yaitu: Dinamika Militer Indonesia dalam Bidang Sosial Tahun 1966-2004.

(Fattah, 2005: 42) menjelaskan bahwa tentara bukanlah tentara yang didirikan dengan suasana yang rapi dengan prajurit yang dipilih baik-baik, tetapi tentara yang lahir dalam revolusi nasional. Tentara yang spontan timbul dari bawah, didorong oleh semangat patriot untuk membela negara yang baru merdeka. Pendapat yang menjelaskan bahwa militer atau tentara kebangsaan Indonesia didirikan melalui proses yang cukup lama, tidak seperti kebanyakan tentara di negara-negara lain yang disiapkan dahulu secara rapi sebelum negara diproklamasikan. Tentara Indonesia terwujud karena keinginan rakyat, terutama para pemuda yang merasa terpanggil untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan negaranya yang telah diproklamasikan. Para pemuda itu mulanya tidak berpikir untuk menjadi tentara, tetapi secara spontan memenuhi panggilan tanah air dengan mengangkat senjata. Kejadian ini terjadi setelah penjajah tidak mau menerima proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945 karena masih tetap menjajah Indonesia. Pada saat itulah pemuda Indonesia bertekad mempertahankan kemerdekaannya, baik melalui perjuangan bersenjata maupun secara hubungan diplomasi politik.

Said (2005: 42-43) menjelaskan militer Indonesia adalah angkatan bersenjata yang menciptakan diri sendiri. Artinya tidak diciptakan oleh pemerintah dan suatu partai politik. Berdirinya militer bukan pula dari atas, tetapi dari bawah, dari rakyat dan oleh rakyat sendiri, terutama dari kalangan pemuda Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan, serta menjaga kestabilan negara. Pengalaman mencipta diri sendiri ini, kemudian menjadikannya merasa tinggi hati, bahkan keras hati terhadap orang sipil dan memiliki rasa *self created army* (fisik yang dibuat oleh tentara), ini menumbuhkan keinginan anggota militer untuk memiliki hak yang sama dengan golongan sipil dalam menentukan kehidupan negara dan jalannya

pemerintahan di Indonesia, melalui fungsi keduanya sebagai kekuatan sosial politik, disamping fungsi kekuatan pertahanan dan keamanan.

Nasution (1971: 9-10) menjelaskan masalah militer ABRI. ABRI diresmikan oleh presiden dan MPRS dalam pelaksanaan kembali ke UUD 1945. ABRI menjadi tulang punggung pemerintah sejak penyelamatan Negara terhadap G-30-S dan secara konstitusional di pertegas posisi atau fungsionalnya oleh Orde Baru melalui sidang umum MPRS IV 1966. Ada pihak-pihak yang mempertentangkan ABRI dengan kepartaian dan memang ada unsur-unsur yang berkecendrungan anti ABRI dalam partai-partai, banyak akses-akses anti ABRI yang di rasakan pada masa kekuasaan partai-partai tahun 50-an dalam masa ABRI.

Sejak semula pimpinan ABRI berpendirian bahwa ABRI adalah merupakan salah satu kekuatan sosial yang bahu-membahu dengan kekuatan-kekuatan sosial lainnya, terutama partai-partai untuk membela dan memebangun Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan ajaran pancasila yang mengandung sifat kekeluargaan sebagaimana di tegaskan dalam penjelasan UUD 1945.

Karim (1989: 38) menjelaskan pecahnya peristiwa gerakan 30 september/PKI ini mempunyai dua arti penting, yaitu tumbangnya kekuasaan Soekarno dan partai komunis indonesia, maka tinggal satu kekuasaan lagi, Angkatan Darat. Munculnya dua kekuatan ini antara lain disebabkan oleh lemahnya institusi politik lainnya, partai politik Masyumi yang semula dekat dengan Soekarno dalam perkembangan berikutnya dinilai membahayakan kekuasaan Soekarno. Sebagai pendukung partai Islam yang moderat Masyumi dipandang Soekarno mengancam kelangsungan rezim yang dipimpinnya, oleh karena itu maka pada tahun 1962 dibubarkannya dengan dalih demi tegaknya UUD 45 dan Pancasila.

Perubahan peta politik Indonesia sebagai akibat dari peristiwa G 30 S/PKI secara tidak langsung disebabkan oleh keinginan PKI untuk mengambil alih kekuasaan dengan jalan menyingkirkan TNI Angkatan Darat melalui serangkaian kegiatan yang dipimpin oleh Letkol. Untung, komandan batalyon I resimen

cakrabirawa, namun berdasarkan pengakuan D.N Aidit dapat dipahami gerakan 30 september ini dimotori oleh partai komunis Indonesia. Kudeta berdarah yang menewaskan beberapa orang pucuk pimpinan TNI Angkatan Darat ini semula direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 1970.

Fattah (2005: 105-106) menjelaskan awal keterlibatan militer dalam kelembagaan politik atas dasar keadaan darurat perang, maka pada tanggal 1957 presiden Soekarno meminta Nasution menjadi mitra politiknya. Tujuan Soekarno untuk memperoleh dukungan tentara. Nasution juga mengusulkan dibentuknya kementerian negara untuk urusan kerja sama sipil dan militer. Permintaan Nasution dipenuhi dalam kabinet Djuanda. Perlu diketahui bahwa Indonesia sejak merdeka tidak mempunyai seorang anggota kabinet dari golongan militer, pada kabinet Djuanda antara 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959 terdapat tiga orang menteri dari militer yaitu Kolonel Natzir sebagai menteri pelayan laut, Kolonel Dr. Azis Saleh sebagai menteri kesehatan dan menteri Suprayogi negara urusan stabilitas khusus. TNI mulai menjadi kekuatan politik yang diakui secara sah, karena ada anggota yang menjabat dalam pemerintah di luar bidang militer. Ini juga bisa dipandang sebagai usaha Soekarno untuk meningkatkan kerja samanya dengan tentara.

Said (dalam Fattah, 2005:105-106) menjelaskan dalam melegitimasi keterlibatan tentara dalam urusan non militer, Nasution mengemukakan konsep jalan tengah tentang tentara yang memberi tempat kepada anggota tentara untuk ikut serta dalam pembinaan negara tanpa harus mendominasi. Dengan konsep Nasution, tentara tidak akan mengambil alih kekuasaan tapi akan ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk menentukan nasib bangsa. Nasution mengabarkan tidak ikut sertanya tentara dalam pembinaan negara adalah seperti menyumbat gunung berapi, yang pasti suatu waktu akan meledak. Konsep ini dalam perkembangannya disebut dengan istilah Dwufungsi ABRI, yang membawa Indonesia ke format perpolitikan untuk mencapai tujuan negara, dengan konsekwen pada Pancasila dan UUD 1945.

Soebijino (1997: 3) menjelaskan proses pendekatan sejarah perkembangan Dwifungsi ABRI tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sistem ketatanegaraan dan sistem politik di Indonesia. Keberadaan sebagian kekuatan sosial politik yang telah melekat sejak kelahiran ABRI, secara nyata telah diterima oleh rakyat, karena peranannya diperlukan bagi kelangsungan sistem ketatanegaraan dan sistem politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan menggunakan pendekatan sejarah, menggambarkan bahwa dalam keadaan kritis ABRI selalu tampil dengan konsep yang jelas. Perintah Jendral Sudirman No. I/PB/D/48 dan instruksi bekerja pemerintah militer seluruh Jawa No. I/MBKD/1948 bahwa ABRI telah mengambil keputusan yang tepat dengan konsep yang jelas. Sebagaimana diketahui Instruksi No. I/MBKD/1948 dari kolonel Nasution berbunyi sebagai berikut: (1) Republik harus tetap berjuang sebagai negara, (2) Pemerintah harus berjalan terus, dan (3) Pemerintah militer adalah satu-satunya alat perjuangan. Keadaan yang demikian selalu berulang pada saat bangsa Indonesia menghadapi krisis, seperti pada saat menghadapi bahaya komunis, baik pada masa demokrasi terpimpin maupun pada masa penumpasan G30S/PKI.

Perlmutter (1977: 14-16) menjelaskan ada 3 jenis organisasi militer yang timbul dalam negara bangsa modern, masing-masing bertindak sebagai reaksi terhadap jenis-jenis kekuasaan sipil yang di lembagakan. (1) Prajurit profesional klasik menonjol dalam sistem-sistem politik yang stabil, (2) Prajurit pretorian berkembang subur dalam lingkungan ketidak stabilan politik, (3) Prajurit revolusioner manunggal dengan suatu orde politik yang stabil sekalipun asal-usulnya datang suatu sistem politik yang tidak stabil, yang kebetulan sedang mengalami kemunduran atau memang baru. Menurut Huntington, tentara modern dibedakan dari tentara sebelum tahun 1789 oleh statusnya sebagai suatu kelompok badan hokum profesional. Perwira profesional di zaman modern merupakan suatu kelas sosial yang baru dan mempunyai ciri-ciri dasar sebagai berikut: (1) Keahlian “manajemen kekerasan”, (2) Pertautan “tanggung jawab klien, masyarakat atau negara”, (3) Korporatisme

“kesadaran dan organisai birokrasi”, dan (4) Ideologi “semangat militer”. Ciri-ciri ini dijumpai dalam semua lembaga militer modern baik di negara maju maupun berkembang, namun akan dibuktikan bahwa semua sistem organisasi ekonomi, politik, sosial dan ideologi jauh lebih penting.

Tahun 1960-an Huntington mengubah modelnya yang semula dengan di masukkan ke dalam perhitungan peranan penting yang kemudian menjelma dalam bentuk intervensi politik militer di negara-negara berkembang yang menganut garis politik revolusioner. Tahun 1968 dalam bukunya yang berjudul *Political Order In Changing Societies*, Huntington menghubungkan intervensi politik militer dengan instabilitas politik dan kemunduran yang berasal dari gerakan sipil ke kekuatan-kekuatan sosial. Huntington melihat bahwa prajurit profesional klasik timbul apabila suatu koalisi sipil memperoleh kekuasaan tertinggi terhadap tentara. Prajurit dengan pengetahuan dan keahlian profesionalnya, menjadi pelindung tunggal negara. Lembaga militer yang merupakan suatu unit korporasi berjuang keras untuk menjaga hubungan ini.

Samego (1998: 103-104) menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan militer berperan di bidang politik. Pertama, adanya anggapan bahwa militer mengemban tugas sebagai penyelamat negara. Anggapan ini muncul karena militer dibentuk sebagai alat pertahanan negara, oleh karena tugas ini pula, rasa nasionalisme yang melekat pada militer menjadi lebih kuat, namun tidak selamanya kepemilikan kekuasaan oleh ABRI ini dijabarkan secara tepat di lapangan. Dalam praktik, posisi yang dominan tersebut sering disalahkan gunakan atau disalahtafsirkan oleh anggotanya. Kedua, ada semacam kepercayaan pada golongan militer bahwa militer memiliki identitas khusus di dalam masyarakat. Militer mengidentifikasikan dirinya sebagai pelindung kepentingan nasional. Ketiga, militer mengidentifikasikan dirinya sebagi orang perorangan atau stabilisator bagi negaranya. Peran ini sering diartikan, bahwa jika militer mengambil alih kekuasaan politik selalu disertai pernyataan pengambil alihan peranan politik itu hanya bersifat sementara sampai stabilitas dan

ketertiban umum terpenuhi. Keempat, militer mengidentifikasi dirinya sebagai pelindung kebebasan umum, namun peran yang secara sistematis dimaksudkan untuk kepentingan militer belaka.

Politik militer (ABRI) telah dijalankan sejak awal negara republik Indonesia berdiri. Pada saat militer sudah mempunyai kecenderungan untuk berpolitik sebagai prajurit revolusioner, kecendrungan ini semakin kuat ketika militer harus menghadapi krisis politik yang terjadi dalam negeri. Peran non-militer ABRI pada masa orde baru dimulai sejak tahun 1966, setelah jenderal Soeharto diangkat sebagai ketua presidium kabinet merangkap menteri utama bidang pertahanan keamanan dan jenderal Nasution secara aklamasi dipilih menjadi ketua majelis permusyawaratan rakyat sementara (MPRS). Keterlibatan peran ABRI secara aktif pada masa awal orde baru ini, antara lain untuk memulihkan krisis nasional yang terjadi akibat pemberontakan G-30-S/PKI. Pada saat situasi politik tidak menentu dan terjadi krisis ekonomi. Kondisi ini mendorong terjadinya demonstrasi mahasiswa yang menuntut pembubaran PKI, penurunan harga/perbaikan ekonomi, serta penggantian kabinet Dwikora yang kemudian dikenal dengan Tritura.

Nasution (1971: 33) menjelaskan bahwa kelahiran Tritura dengan aksi-aksi masanya secara fisik dan politik memelopori Orde Baru. Dengan angkatan 1966 atau Kesatuan-kesatuan Aksi lahir lah kekuatan baru yang tidak menuruti pola lama dengan partai-partai dan karya-karyanya, sehingga terbuka Proses Pengkaryaan Baru. Kesatuan-kesatuan aksi merupakan wadah-wadah baru yang riil mempersatukan karaya, sebagai KAMI untuk mahasiswa, KAPPI untuk belajar dan lain-lain. Partai-partai bersatu dalam Front Pancasila, karena itu pada awal tahun 1966 terdapat sebutan kelompok kekutan Orde Baru, diantaranya: Militer, Front Pancasila, Angkatan 1966/Satuan Aksi-Aksi.

Samego (1999: 46-47) menjelaskan sulitnya perkembangan sosial politik di Indonesia tanpa memperhitungkan peran tentara di dalamnya, terlalu berlebihan jika masalah kenegaraan hanya diserahkan kepada masyarakat sipil. Khususnya sejak

pemerintahan Orde Baru, keterlibatan TNI dalam berbagai kehidupan non-militer di Indonesia dan khususnya politik, merupakan bagian keseluruhan dari dinamika serta dialektika kepolitikan nasional. Karena begitu besarnya pengaruh TNI dalam politik, maknanya tidak lagi dapat ditafsirkan hanya sebagai bentuk dominasi, melainkan telah berubah menjadi sebuah fenomena dominasi militer atas persoalan-persoalan sipil. Melalui doktrin peran sosial politik TNI dan ketentuan perundangan yang mendasarinya, kemudian berbagai bentuk implementasi baik struktural maupun fungsional beranggapan bahwa kehadiran TNI dalam kehidupan sosial politik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan Republik Indonesia.

Reformasi kini telah menjadi agenda negara ini, jika reformasi diterima sebagai semangat untuk membangun kehidupan yang lebih demokratis, mengedepankan kesetaraan daripada penumpukan kekuasaan, serta penegakan hukum, maka sudah semestinya dilakukan koreksi terhadap penyimpangan yang selama ini dilakukan pemenang kekuasaan, hingga saat ini perkembangan politik yang ada masih memosisikannya sebagai kekuatan *hegemony* (penguasa), untuk menjaga nama baik TNI serta meluruskan jalannya sejarah, sebagai kekuatan yang lahir dari rakyat. TNI harus kembali tumbuh bersama rakyat dan kembali memperjuangkan kepentingan rakyat. Saat rakyat menuntut reformasi, sudah seharusnya TNI memberikan jalan keluarnya dan menjadi pelopornya.

Kadi (2000: 42-41) menjelaskan pada masa terakhir dari pemerintahan Soeharto oleh pelanggaran-pelanggaran di berbagai bidang kehidupan, merajalelanya teror, ancaman dan tekanan yang datangnya justru dari pihak pemerintah utamanya ABRI. Meskipun mengklaim diri sebagai negara hukum umum jaminan persamaan warga negara di bidang hukum belum terwujud karena yang merajalela di lembaga hukum yaitu hukum rimba, siapa yang kuat atau berkuasa yang menang, banyaknya mafia peradilan dimana vonis terhadap suatu perkara dapat dibeli oleh pihak yang berperkara. Terjadinya pelanggaran HAM secara terang-terangan seperti pada kasus pembunuhan seorang aktivis buruh di pabrik PT Catur Putra Surya Porong Sidoarjo

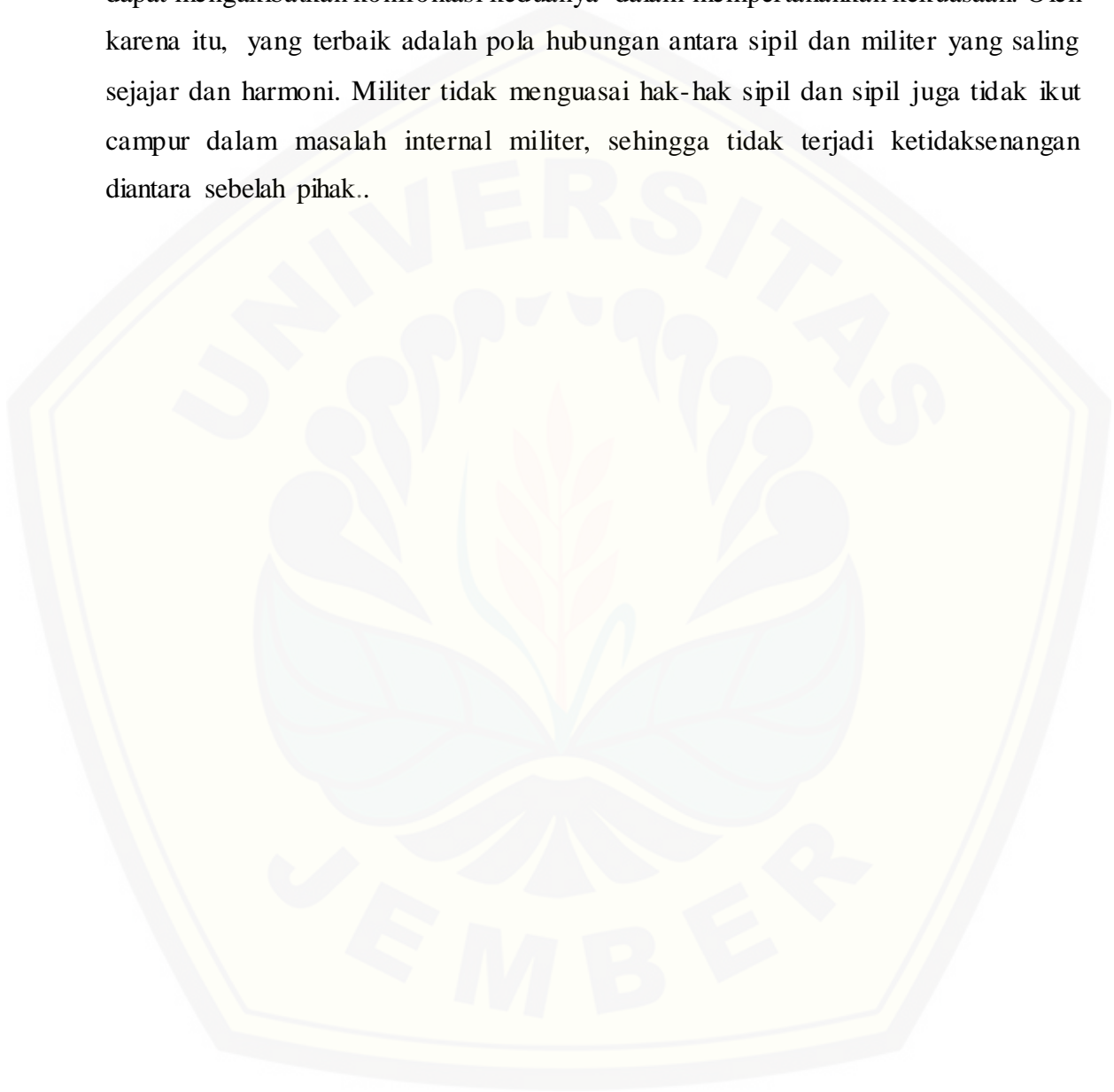
tahun 1993 yang bernama Marsinah. Dalam bidang politik, timbul gerakan politik terhadap rakyat yang diarahkan kepada pemberian dukungan kepada Golkar, pelaksanaan dwifungsi ABRI semakin menyimpang dari kebijakan penugasan dengan menempatkan dominasi ABRI di lembaga sipil, rakyat dipisahkan dari mekanisme pengambilan keputusan, rakyat “dilumpuhkan” sehingga tidak berdaya sama sekali.

Kontras (20005: 25-26) menjelaskan semangat demokrasi dan fungsi militer atau TNI di Indonesia dalam praktek dan kebijakan yang tersedia kini selaras dengan agenda reformasi dan prinsip-prinsip militer di negara demokrasi. Paradigma baru TNI pasca 1998 adalah Paradigma yang dilandasi cara berpikir yang bersifat prospektif ke masa depan yang memandang TNI sebagai bagian dari sistem nasional. Paradigma baru ini dalam fungsi sosial politik mengambil bentuk dengan merubah posisi dan metode tidak selalu harus di depan. Hal ini mengandung arti bahwa pada masa Orde baru memang diperlukan kepeloporan dan keteladanan TNI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penulis menggunakan pendekatan sosiologi militer. (Caforio, 2000:7) menjelaskan sosiologi militer adalah angkatan bersenjata sebagai organisasi atau institusi bertipe khusus dengan fungsi sosial. Karena sosiologi militer membahas banyak topik dan perlu di catat bahwa cakupannya tidak hanya pada institusi militer dan anggotanya saja, tetapi juga meluas ke bidang profesionalisme militer, hubungan akademisi industri militer, hubungan sipil militer dalam politik dan persaingan kekuasaan.

Selain itu, untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, penulis juga menggunakan teori hubungan sipil militer. Menurut (Bakti, 2000: 23) hubungan sipil militer ada dua model Pertama, model negara-negara Barat, yaitu hubungan sipil yang menekankan “supremasi sipil atas militer” (*civilian supremacy upon the military*) atau militer adalah sub-ordinat dari pemerintahan sipil yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum. Kedua, model negara-negara berkembang yang menganggap bahwa hubungan sipil-militer

tidak menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Dalam negara berkembang, militer merupakan kekuatan sosial politik yang memegang peranan penting, hal ini dapat mengakibatkan konfrontasi keduanya dalam mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu, yang terbaik adalah pola hubungan antara sipil dan militer yang saling sejajar dan harmoni. Militer tidak menguasai hak-hak sipil dan sipil juga tidak ikut campur dalam masalah internal militer, sehingga tidak terjadi ketidaksenangan diantara sebelah pihak..



BAB 3. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah karena sesuai dengan masalah yang dikaji. Metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1985:32). Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian sejarah adalah prosedur kerja penelitian yang digunakan sejarawan dalam melakukan rekonstruksi peristiwa masa lampau secara kritis berdasarkan pada jejak-jejak sejarah yang ditinggalkan.

Penelitian historis ada empat jenis yaitu 1) Penelitian Sejarah Komparatif, 2) Penelitian Yuridis atau Legal, 3) Penelitian Biografis, 4) Penelitian Bibliografis. Penelitian ini termasuk sejarah komparatif yaitu penelitian dengan metode sejarah dikerjakan untuk membandingkan faktor-faktor dari fenomena-fenomena sejenis pada suatu periode masa lampau. Dalam hal ini, peneliti ingin memperlihatkan unsur-unsur perbedaan dan persamaan dari fenomena-fenomena sejenis (Natzir, 1983:52).

Langkah pertama dalam metode penelitian sejarah adalah heuristik. Terkait pada kegiatan Heuristik dalam penelitian sejarah, penulis berusaha mencari sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini, yaitu “Dinamika Peranan Militer di Indonesia Dalam Bidang Sosial Politik Tahun 1966-2004”. Dalam mengkaji peneliti mengumpulkan sumber, peneliti menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yaitu kesaksian dari seorang saksi yang hadir dalam peristiwa tersebut dan sejaman. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang informasinya diperoleh dari orang yang secara tidak langsung terlibat dalam suatu peristiwa sejarah. Sumber primer dari penelitian ini adalah karya Dra. H. Nasution, dengan judul buku “*Kekarjaan ABRI*”, karya Sospol Hankam dengan judul “*Dwifungsi dan Kekaryaan ABRI*”. Sedangkan sumber sekunder yang diperoleh diantaranya adalah buku dengan judul *Demiliterisasi Tentara, Dwifungsi ABRI Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia, Sejarah Indonesia Modern*

1200-2004, Gusdur Menjawab Perubahan Zaman dan sumber penunjang lainnya seperti buku-buku lain yang mendukung data mengenai sosialpolitik militer yang terjadi di Indonesia pada tahun 1966-2004. Adapun tempat-tempat yang digunakan dalam mencari dan mengumpulkan sumber-sumber buku yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti Perpustakaan dan Laboratorium Pendidikan Sejarah, UPT Perpustakaan UNEJ, dan beberapa koleksi pribadi.

Setelah sumber-sumber sejarah tersebut terkumpul, maka langkah kedua dalam penelitian sejarah setelah sumber berhasil ditemukan yakni melakukan kritik sebagai tindak lanjut dari pengujian sumber. Menurut Winarno Surahman, kritik adalah tahap memilah-milah dan mengkaji sumber-sumber yang telah diperoleh untuk mengetahui sumber tersebut benar-benar asli dan dapat dipercaya atau tidak. Dalam tahap kritik ini penulis melalui 2 cara, yakni kritik intern dan kritik ekstern bersangkutan dengan persoalan otentik tidaknya suatu buku, buku itu asli atau turunan dan utuh tidaknya sumber-sumber tersebut. Sedangkan kritik intern merupakan kegiatan untuk meneliti kebenaran isi. Peneliti membandingkan sumber-sumber yang berupa buku, skripsi dan jurnal yang sudah terkumpul. Inti atau tujuan akhir yang ingin dicapai dari melakukan kritik adalah untuk menetapkan otentitas dari sumber yang diuji dan nantinya akan digunakan penulis untuk menghasilkan fakta sejarah.

Interprestasi sejarah sering disebut dengan analisis sejarah. Dalam hal ini, ada dua metode yang digunakan yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan sedangkan sintesis berarti menyatukan. Keduanya di pandang sebagai metode utama didalam interprestasi Kuntowijoyo dalam (Abdurahman, 2007:73). Analisis sejarah itu sendiri bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu dalam suatu interprestasi yang menyeluruh. Sehingga proses analisis dan sintesis kajian ini akan lebih mudah jika menggunakan beberapa pendekatan dan teori. Pendekatan merupakan penggambaran penulis mengenai suatu peristiwa dari segi

mana penulis memandang. Teori berfungsi sebagai alat analisis dalam pembahasan suatu permasalahan yang berguna dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi pengetahuan. Teori yang dipakai adalah peran individu sebagai subjek sejarah.

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi politik, ilmu kekuasaan. Devuger mengemukakan bahwa kekuasaan ada dalam setiap pengelompokan manusia yang saling memainkan peran dan tanggungjawab yang cenderung dipertahankan untuk mengaktualisasikan identitasnya. Identitas merupakan basis bagi kepentingan militer (interest). Antara identitas dan kepentingan tidak terpisahkan, artinya atribut pemahaman diri dari aktor akan berimplikasi pada apa yang harus dilakukan berdasarkan identitas yang melekat pada dirinya. Aktor tidak dapat memutuskan apa kepentingannya atau apa yang harus dilakukannya, kecuali jika ia memahami siapa mereka dalam sebuah hubungan sosial. Untuk mempertahankan identitasnya, aktor harus mempertahankan kepentingan kepentingna begitu sebaliknya (Wendt, 1944: 231). Militer dapat mengembangkan kepentingan tersebut dengan cara memainkan, memepertahankan atau mengembangkan identitasnya untuk aktif dalam politik. Kepentingan kemudian menjadi landasan tindakan atau kebijakan yang diambil dalam hubungannya dengan aktor lain. Soeharto dapat menerapkan kepentingan tersebut dalam kebijakannya untuk memperkuat kekuasaannya melalui kepentingan militer dalam politik dan pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini disamping menggunakan pendekatan sosiologi-politik, diterapkan pada teori pembuatan kebijakan dan teori leadership (kepemimpinan).

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah historiografi. Histografi merupakan klimaks dari penelitian sejarah dan merupakan bagian dari metode sejarah yaitu menulis hasil interprestasi atas fakta-fakta sejarah yang telah disusun secara analitis, kronologis dan sistematis. Menurut Abdurahman (2007:76) historigrافي merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang

telah dilakukan. Penelitian sejarah hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari awal (fase perencanaan) sampai dengan akhir (penarik kesimpulan). Historiografi yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menyusun cerita sejarah dengan merangkai fakta-fakta sejarah dari hasil tiga langkah metode penelitian yang dilalui sebelumnya yakni berupa hasil heuristik, kritik dan interpretasi bagaimana *Dinamika Peranan Militer di Indonesia dalam Bidang Sosial Politik Tahun (1966-2004)*.

Tujuan dari historiografi adalah melukiskan hasil interpretasi agar menjadi kisah sejarah yang tidak hanya mengajarkan fakta-fakta tetapi juga disertai dengan uraian-uraian secara objektif mengenai pokok-pokok masalah sehingga nantinya akan terwujud kisah sejarah. Hal yang dilakukan peneliti dalam langkah ini adalah menuangkan segala hasil interpretasi dengan cara merangkai fakta-fakta sejarah yang sudah dikritik dan diinterpretasi dengan sajian yang obyektif, sistematis, kronologis serta menarik, sesuai dengan kemampuan dan kemahiran yang peneliti miliki, dan tata bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baku.

Selanjutnya penyajian dari hasil penelitian ini adalah penyusunan kisah sejarah dalam bentuk karya tulis ilmiah (Skripsi). Adapun sistematika penulisan skripsi ini meliputi 6 bab yaitu; Bab 1 Pendahuluan, memaparkan latar belakang permasalahan, ruang lingkup permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Bab 2 Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang kajian teoritis dan penelitian yang terdahulu yang berhubungan dengan Peran Militer Indonesia pada masa Orde Baru dan masa Reformasi dalam Bidang Politik Ekonomi serta Sosial Budaya. Bab 3 adalah Metode Penelitian yang menggunakan metode sejarah. Metode sejarah tersebut meliputi empat langkah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Pada Bab 4 Latar belakang dari Peranan Militer Indonesia dalam Bidang Sosial Politik. Bab 5 *Dinamika Peranan Politik Militer di Indonesia Dalam Bidang Sosial Politik Tahun 1966-2004* dan yang terakhir Bab 6 berisi kesimpulan dan saran.

BAB 4. DINAMIKA TUGAS POKOK DAN FUNGSI MILITER DI INDONESIA TAHUN 1966-2004

4.1 Tugas Pokok dan Fungsi Militer di Indonesia Tahun 1966-2004

Sejak pecahnya “Gerakan 30 September”, yang sebenarnya melakukan aksi menumpas gerakan tersebut dan kemudian menghadapi tindakan Presiden Soekarno dalam mempertahankan kekuasaannya kelompok yang disebut oleh Roger Paget dengan *Soeharto Group*: yaitu kelompok militer yang berubah-ubah isinya, keanggotaan personilnya, serta pandangan pendiriannya sejak 1 Oktober 1965 dan didalamnya tercakup juga orang-orang dan kelompok sipil. Kelompok Soeharto Group atau Kelompok Soeharto ini sejak Oktober 1965 sampai dengan Februari 1966, bercorak dan bertindak benar-benar bersifat militer. Namun perkembangan situasi pergolakan politik di Jakarta pada awal Maret 1966 yang semakin eksploif dan anarkis telah mendorong kelompok Soeharto bertindak dalam bentuk lain. Karena lumpuhnya lembaga seperti DPR dan MPR di bawah kekuasaan totaliter Presiden Soekarno maka Jendral Soeharto mulai memihak kepada kaum demonstran KAMI dan KAPPI yang menyebut dirinya sebagai DPR jalana (Muhaimin, 1982: 211).

Dengan adanya peristiwa-peristiwa internal yang dialami Indonesia, ditambah banyak yang beranggapan bahwa presiden Soekarno pada waktu itu mendukung dengan adanya PKI di Indonesia. Membuat sebagian kelompok mulai mempertanyakan posisi Soekarno yang kemudian Muncul gerakan-gerakan masyarakat menentang Soekarno. Salah satu tekanan yang di dapatkan Soekarno adalah dari segi Militer, TNI-AD mengambil langkah baru pada awal Maret 1966. Dengan melakukan tekanan-tekanan langsung kepada Presiden, yang akan dilakukan pada tanggal 12 Maret.

Adanya banyak pemberontakan yang dilakukan masyarakat kepada Soekarno pada tanggal 11 Maret Tahun 1966, Presiden Soekarno meluncurkan surat perintah

kepada Menteri Panglima Angkatan Darat Jendral Soeharto, yang kemudian dikenal dengan sebutan Surat Perintah Sebelas Maret. Surat ini mengandung arti yang sangat penting bagi TNI AD dalam hubungannya dengan legitimasi peranan politik yang dimainkannya (Muhaimin, 1982: 212).

Surat Perintah Sebelas Maret ini melatarbelakangi TNI AD yang diketuai Soeharto melakukan tindakan-tindakan keamanan dan stabilitas di Republik Indonesia. Kemudian menumbuhkan golongan fungsional (Golongan Karya), yang menumbuhkan kudeta dalam kepemimpinan Negara. Hal itu yang menggantikan kepemimpinan Presiden Soekarno turun dari jabatan yang kemudian dengan Panglima Jendral Soeharto (Lampiran B).

Tampalnya Orde Baru dibawah kepemimpinan Jendral Soeharto bertujuan melakukan koreksi terhadap penyimpangan Orde lama Soeharto menumbuhkan kekuatan pada militer dengan mendasarkan pada Dwifungsi ABRI/TNI. Dwifungsi ABRI dijadikan alasan ikut sertanya ABRI ke dalam semua aspek kehidupan bernegara. Untuk menjalankan peran politiknya, militer didukung oleh organisasi teritorial, yang dalam praktik telah digunakan untuk memenangkan salah satu kekuatan politik dan alat kekuasaan Soeharto. Hal ini menyebabkan munculnya kekuasaan otoriter yang menghalangi tumbuhnya perkembangan demokrasi (Fattah, 2005: 138).

Dwi Fungsi ABRI merupakan sebuah konsep dasar militer dalam menjalankan peran sosial politik mereka di negeri ini. Dwi Fungsi ABRI yang diketahui masyarakat di luar lingkungan ABRI adalah sebagai sebuah bentuk militerisme, campur tangan militer dalam permasalahan politik, campur tangan militer dalam permasalahan-permasalahan negara lainnya yang penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dwi Fungsi ABRI dilihat sebagai sebuah intervensi militer dan legitimasi militer untuk melakukan tindak kekerasan terhadap rakyat. Dwi Fungsi berarti masuknya militer dalam posisi-posisi/jabatan-jabatan penting dan mengurangi jatah orang-orang sipil. Keadaan demikian membuat

masyarakat sipil/civil society mengalami kemandekan dalam pembinaan SDM, kaderisasi dan kepemimpinan. Sipil dianggap masih bodoh dan belum mampu memimpin atau mengelola negara (Soebijono, 1997: 2).

Dwifungsi ABRI sendiri dipahami sebagai “jiwa, tekad dan semangat pengabdian ABRI, untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka penciptaan tujuan nasional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.” Berangkat dari pemahaman tersebut, ABRI memiliki keyakinan bahwa tugas mereka tidak hanya dalam bidang hankam namun juga non-hankam. Sebagai kekuatan hankam, ABRI merupakan suatu unsur dalam lingkungan aparatur pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Sebagai kekuatan sosial, ABRI adalah suatu unsure dalam kehidupan politik di lingkungan masyarakat yang bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional.

Mengenai ABRI sebagai kekuatan sosial, setidaknya ada dua fungsi yang dimiliki oleh ABRI. Fungsi tersebut ialah fungsi stabilisator dan fungsi dinamisator. Identitas ABRI sebagai pejuang dan kemandungannya dengan rakyat secara otomatis mendorong serta menjadikan ABRI sebagai dinamisator dan stabilisator dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Sejarah mencatat bahwa ABRI telah membuktikan kedua fungsinya dalam tindakan-tindakan berikut ini.

1. ABRI sebagai dinamisator:
 - a. Kemampuan ABRI untuk berkomunikasi dengan rakyat, untuk merasakan dinamika masyarakat, memahami aspirasi dan kebutuhan-kebutuhan rakyat, Memungkinkan ABRI untuk mendorong masyarakat untuk lebih giat melakukan partisipasi pembangunan.

- b. Kemampuan tersebut dapat mengarah kepada dua jurusan. Disatu pihak hal tersebut merupakan potensi nyata ABRI membantu masyarakat mengenakan asas-asas serta tata cara kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk juga rencana-rencana serta proyek-proyek pembangunan. Di lain pihak hal itu menyebabkan ABRI dapat berfungsi sebagai penyalur aspirasi-aspirasi dan pendapat-pendapat rakyat.
 - c. Untuk dapat lebih meningkatkan kesadaran nasional dan untuk dapat mensukseskan dan untuk dapat mensukseskan pembangunan, diperlukan suatu disiplin sosial dan disiplin nasional yang mantap. Oleh karena disiplin ABRI bersumber pada Saptamarga dan Sumpah Prajurit, sehingga secara masyarakat, maka ABRI dapat berbuat banyak dalam rangka pembinaan serta peningkatan disiplin nasional tersebut.
 - d. Sifat ABRI yang modern serta penguasaan ilmu dan teknologi serta perlatan yang maju, memberikan kemampuan kepada ABRI untuk juga memelopori usaha-usaha modernisasi.
2. ABRI sebagai stabilisator:
- a. Kemampuan ABRI untuk berkomunikasi dengan rakyat, untuk merasakan dinamika masyarakat dan untuk memahami aspirasi-aspirasi yang hidup dalam masyarakat, membuat ABRI menjadi salah satu jalur penting dalam rangka pengawasan sosial.
 - b. Kesadaran nasional yang tinggi yang dimiliki oleh setiap prajurit ABRI merupakan suatu penangkal yang efektif terhadap pengaruh

sosial yang bersifat negatif dari budaya serta nilai-nilai asing yang kini membanjiri masyarakat Indonesia.

- c. Sifat ABRI yang realistis dan pragmatis dapat mendorong masyarakat agar dalam menanggulangi masalah-masalah berlandaskan tata pilar yang nyata dan berpijak pada kenyataan situasi serta kondisi yang dihadapi, dengan mengutamakan nilai kemanfaatan bagi kepentingan nasional. Kemudian rakyat akan dapat secara tepat waktu menentukan prioritas-prioritas permasalahan dan sasaran-sasaran yang diutamakan.
- d. Dengan demikian akan dapat dinetralisasi atau dikurangi ketegangan, gejolak-gejolak dan keresahan-keresahan yang pasti akan melanda masyarakat yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan dan karenanya mengalami perubahan sosial yang sangat cepat.

Keterlibatan ke wilayah politik yang makin membesar di era Orde Baru membuat militer tidak hanya dominan, tapi hegemonik. Yang menjadi persoalan ialah (1) militer membatasi demokrasi, yakni dengan melanggengkan sistem politik yang monolitik dan semiotoriter; (2) militer, karena merasa bagian absah dari kekuasaan, melakukan kontrol ketat atas kebebasan masyarakat; (3) militer menjadi alat efektif bagi penguasa untuk mencengkeramkan kepentingan kelanggengan kekuasaannya; (4) tatkala militer dalam praktiknya di lapangan kerap melakukan pelanggaran HAM dan justru menggelisahkan masyarakat. Posisi politik mereka tidak dipersoalkan, kecuali menjelang akhir Orde Baru, tatkala tuntutan reformasi marak, berbagai kalangan masyarakat menuntut doktrin Dwi Fungsi dihapus. Artinya, militer harus hengkang dari wilayah politik menuju profesionalitas militer.

Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat (demonstrasi, kriminal, kritik terhadap pemerintah) dihadapi pemerintah dengan tindakan represif. Pada era reformasi, militer tidak lagi berpolitik. Salah satu yang menjadi tuntutan demonstrasi mahasiswa pada reformasi tahun 1998 yaitu dwi fungsi ABRI, artinya militer kembali

kepada profesionalitasnya, yaitu bertugas menjaga Kesatuan Negara Republik Indonesia, kembali kepada tugas pokok atau tugas dasarnya. Gerakan reformasi telah menghadapi TNI pada berbagai tantangan. Hingga saat ini, militer belum sepenuhnya profesional, walaupun demikian upaya TNI untuk keluar dari kancah politik dan menata dirinya tetap. Krisis kredibilitas yang pernah dialamatkan ke institusi tentara akibat tindakan-tindakan diluar norma-norma profesionalisme militer

4.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Militer Pada Masa Orde Baru

Pembangunan di masa Orde baru merupakan kegiatan sistematis yang didukung oleh tiga hal penting diantaranya: pertama, modal asing yang menjadi tumpang utama untuk membiayai pembangunan nasional. Kedua, militer yang menjadi penegak stabilitas nasional dan keamanan. Ketiga, setralisasi dan hegemoni kekuasaan pemerintah pusat. (Kartono, 1996:259) ketiga pendukung tersebut merupakan tombak kekuatan dari pemerintah saat itu. Militer sebagai pendukung pembangunan berfungsi sebagai pengawal Negara mengemban tugas-tugas yang berat, yaitu menjadi ujung tombak dalam menangani keamanan, menangkal subversi, dan berkonfrontasi langsung melawan musuh-musuh yang ingin melemahkan dan menghancurkan Republik Indonesia, sedangkan peran militer sebagai partisipan politik memiliki peran yang dominan di pemerintahan untuk menopang pembangunan sebagai tujuan nasional. Peranan tersebut erat kaitanya dengan jati diri yang dimiliki yaitu cara berpikir dan perilaku militer yang serba praktis, pragmatis, efisien-efektif, kritis dan modern sebagai pendorong untuk memberikan dukungan positif bagi kelancaran usaha pembangunan. Kegiatan sosial, politik, cultural itu dilakukan oleh militer sebagai wujud peran stabilator dan dinamisor Negara, disamping menyelesaikan tugas-tugas perlindungan., penjaminan

keamanan, perwakilan, pemberantas anarki, dan macam-macam disfungsi sosial.

Soeharto menyusun birokrasi untuk memperkuat kebijakannya sehingga membentuk angkatan bersenjata yang loyal dan terintegrasi di bawah komandonya serta lembaga legislatif dan yudikatif yang tunduk pada lembaga eksekutif yang dipimpinya. Sistem kepartaian yang disederhanakan dan pucuk pimpinannya ditentukan atas dasar loyallitas kepadanya, dan membentuk lembaga kepresidenan yang luar biasa kuatnya, serta pers yang terkendali. Kebijakan membentuk format politik Orde Baru yang bersifat darurat, mengarah pada sentralisasi di tangan eksekutif bertujuan memperbaiki perekonomian negara dan menstabilkan kondisi politik (Haris, 1996:25)

Militer memiliki peran yang sentral mendukung format Orde Baru tersebut dengan bertumpu pada tujuannya sebagai dinamisator dan stabilator dalam pemerintahan. Peran militer sebagai dinamisator dapat diartikan sebagai unsur penggerak, pelopor, pengambil inisiatif untuk berbuat sesuatu yang positif, dan pendobrak kemacetan. Militer harus dapat berperan sebagai penggerak dan pendorong perjuangan pembangunan sesuai dengan kemampuan melaksanakan konsep-konsep pembangunan yang bersifat nasional, ikut serta secara aktif dalam seluruh bidang yang menyangkut kehidupan bangsa dan Negara. Militer sebagai dinamisator harus aktif mempercepat proses transformasi (dari nilai-nilai tradisional ke nilai-nilai modern) yang bertujuan mencapai keselarasan antara tingkat kemajuan pembangunan dan kondisi masyarakat saat itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi militer dimasa orde baru tidak hanya menjaga keamanan Negara, tetapi juga berkencimpung dalam Bidang Politik, Bidang Ideologi, Bidang Ekonomi, dan Sosial Budaya.

1. Bidang Politik.

Militer dalam Bidang Politik adalah mengisi jabatan Anggotanya di lembaga-lembaga Pemerintah, baik di angkat pusat maupun daerah. Peranan ini berdasarkan Fungsi kekaryaan demi suksesnya usaha-usaha Pemerintah, serta pengabdian kepada rakyat dan Negara dengan melaksanakan dan memelihara sistem politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, membantu konsolidasi dan pengembangan kemampuan unsure-unsur Politik, menyukseskan Pemilu dan sidang-sidang MPR.

2. Bidang Ideologi

Militer di bidang Ideologi bersumber pada Pancasila Sebagai Ideologi Negara yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 ini berdasarkan asas-asas kekeluargaan, musyawarah dan Gotong Royong. Berdasarkan asas-asas tersebut Membuat militer berpartisipasi dalam kegiatan sosial politik, baik dibidang eksekutif maupun legislatif dalam rangka mencapai tujuan Nasional melalui tahap-tahap pembangunan dengan membantu menanamkan Pancasila di dalam sanubari setiap warga Indonesia sebagai falsafah bangsa dan Negara Indonesia, dan mengamankan dan mengamalkan Pancasila (Hankam, 1978:7)

3. Bidang Ekonomi

Militer di bidang ekonomi membutuhkan partisipasi rakyat secara penuh untuk mewujudkan kesejahteraan, sehingga militer bertugas membantu dan menjadi dinamisator untuk menggerakkan pembangunan. Masyarakat Indonesia yang masih bersifat tradisional memiliki kebiasaan, tradisi, dan tata cara hidup sederhana. Prilaku tersebut menghambat kegiatan modernisasi dan pembangunan

(Hankam, 1978:9). Peranan Militer di bidang ini adalah sebagai pondobrak dengan membantu menyediakan prasarana-prasarana sosial dan ikut serta dalam proses pembangunan sebagai subyek yang produktif.

4. Bidang Sosial Budaya

Militer di bidang sosial budaya melakukan usaha menjaga pertentangan diantara suku, Agama, dan Ras. Peranan ini dilaksanakan dengan cara mewujudkan generasi muda sebagai kekuatan nasional yang tanggap, tangguh, dan trampil untuk pembangunan, mencegah pengaruh negatif dari luar yang dapat merusak kebudayaan dan kepribadian nasional melalui pembinaan dan pemeliharaan kebudayaan nasional untuk memperkuat kepribadian bangsa, kebanggaan Nasional, dan kesatuan Nasional (Hankam, 1978: 10).

Usaha dan kegiatan Militer tersebut merupakan wujud peran militer sebagai stabilator dan dinamisator yaitu penggerak masyarakat dalam pemerintah dan menjadi kekuatan keamanan dalam setabilitas politik dan bidang lainnya. Sehingga peran militer menuju orde baru merupakan penangkalan dini terhadap berbagai potensi yang mengarah ke gejolak sosial dan politik (Samego,2000:84). Pelaksanaan peran sosial Politik secara teknis berada dibawah pejabat intansi yang menggunakannya, sehingga militer bertanggung jawab pada pejabat setempat tersebut selama melaksanakan tugas dan kewajiban para anggotanya.

Dunia militer yang mengangkat kedunia sosial, politik dan ekonomi didukung dengan adanya keputusan presiden soeharto, dalam pengembangan keputusan ini soeharto didasari adanya undang-undang No 2 tahun 1988 tentang prajurit angkatan

bersenjata republik Indonesia (lembaran Negara republik Indonesia tahun 1988 Nomor 4, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3368). Yang berbunyi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berkewajiban membentuk kepribadian diri yang memancarkan sikap dan perilaku prajurit rakyat, prajurit pejuang, sertaprajurit nasional, yang patriotik dan profesional, pengemban amanat penderitaan rakyat demi cita-cita bangsa sebagai perwujudan hakikat prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia seperti tercermin dalam Sapta Marga atau Tujuh sumpah prajurit yang diantaranya sebagai berikut:

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit

4.1.2. Tugas Pokok Militer dan Fungsi Pada Masa Reformasi

Pada era reformasi, militer tidak lagi berpolitik Salah satu yang menjadi tuntutan mahasiswa pada reformasi tahun 1998 yaitu dwi fungsi ABRI, artinya militer kembali kepada profesionalitasnya, yaitu bertugas menjaga Kesatuan Negara Republik Indonesia, kembali kepada tugas pokok atau tugas dasarnya, keterlibatan militer dalam politik yang terlalu dalam, membuat rakyat sipil dan mahasiswa tidak

puas, ditambah lagi kepemimpinan Soeharto yang cenderung otoriter selama 32 tahun berkuasa, dengan menggunakan militer sebagai salah satu alat untuk mempertahankan kekuasaannya

Reformasi militer yang digulirkan sejak 1998 belum sepenuhnya berhasil menghilangkan karakter TNI sebagai tentara politik dan niaga. Untuk merombak total karakter TNI, penting untuk segera mengimplementasikan prinsip-prinsip supremasi sipil. Pelaksanaan reformasi internal tersebut menunjukkan bahwa implementasi agenda reformasi sektor keamanan memiliki satu tantangan utama, yaitu: TNI harus dapat melepas sepenuhnya karakter tentara politik dan tentara niaga. Dua karakter ini menempatkan aktor militer sebagai abdi negara yang ditugaskan untuk mempertahankan negara tanpa berupaya untuk mengembangkan sejarah, ideologi, dan landasan moral dari evolusi negara. Abdi negara ini lalu mengembangkan misi teknis operasional berupa penggunaan kekuatan bersenjata untuk mempertahankan kedaulatan politik dan teritorial negara dibawah kendali otoritas politik sipil yang sah.

Hakekatnya bahwa TNI harus dapat melepas sepenuhnya karakter tentara politik dan tentara niaga dilihat dari Reformasi militer sendiri hanyalah Reformasi Sektor Keamanan belaka yakni untuk membangun hubungan sipil militer yang baik, Sipil yang memahami militer dan militer yang mengerti sipil” Artinya : sipil dan militer bisa dipandang sebagai makhluk yang otonom dan pada saat yang bersamaan juga dipandang sebagai saling lekat. Jaminan reformasi militer sebagaimana dimaksud UU No 34/2004 Tentang TNI, sebagai, “tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi,

supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi”. Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa tugas militer hanya sepenuhnya untuk mempertahankan kedaulatan politik dan teritorial negara dibawah kendali otoritas politik sipil yang sah.

Adanya undang-undang dasar tentang TNI yang ada di No 34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia. Disitu jelas menyebutkan pada BAB IV Tentang Peran, Fungsi dan Tugas militer sudah di tata dan diatur:

Bagian dua Pasal 6 tentang Fungsi TNI.

- 1) TNI, sebagai alat pertahanan Negara, Berfungsi sebagai:
 - a) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
 - b) Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan pemulih terhadap kondisi keamanan Negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- 2) Dalam melakukan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan Negara.

Bagian ketiga tentang Tugas TNI Pasal 7

- 1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. Operasi militer untuk perang;
- b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. Mengatasi aksi terorisme;
 4. Mengamankan wilayah perbatasan;
 5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 8. Memperdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;

10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
 11. Membantu mengamankan tamu Negara setingkat kepala Negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*serach and rescue*); serta
 14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan (Lampiran D).
- 3.) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara

Adanya undang-undang tentang peran, tugas, dan fungsi ini, militer Indonesia sudah mendapatkan tujuan-tujuan yang jelas tentang jati diri TNI itu sendiri. Ini membuat militer tidak bisa bertindak seenaknya sendiri seperti pada masa orde baru.

BAB 5. PERAN MILITER INDONESIA TAHUN 1966-2004

Militer memiliki Ideologi berorientasi Nasional dan memandang dirinya sebagai penjaga persatuan dan kemerdekaan nasional. Oleh karena itu, situasi-situasi yang membahayakan kedaulatan Nasional merupakan tantangan besar bagi kalangan militer. Sehingga berbagai persoalan politik sejak awal kemerdekaan sampai pemerintahan Soeharto merupakan perhatian militer. Dimasa liberal, Indonesia berusaha menciptakan sebuah sistem multi partai untuk mendukung terselenggaranya pembangunan politik. Namun, hanya menciptakan terancamnya persatuan Nasional akibat kehidupan partai-partai yang lebih mementingkan kelompok dan rasa primordial yang tinggi (Ricklefs, 1981: 500)

5.1 Peran Militer Indonesia Pada Era Orde Baru

Peranan Militer dalam pemerintah dibidang ekonomi, politik dan sosial, di legitimasi melalui konsep Dwifungsi ABRI yang sebagai sosial politik bergerak secara bersamaan dalam dua lingkungan kehidupan politik dan kemasyarakatan yang dikenal sebagai (supra struktur politik) dan (infra struktur politik). Ini berawal dari kondisi bangsa Indonesia pasca kemerdekaan, dimana ABRI berusaha membantu masyarakat Indonesia dalam bidang hankam maupun non-hankam. Konsep Dwifungsi ABRI dicetuskan oleh Nasution, yang mana konsep Dwifungsi tersebut merupakan titik tolak Politik Militer (Soebijono, 1997: 56).

Pada masa Orde Baru dari tahun 1966-1998, ABRI/TNI sepenuhnya menjadi alat kekuatan politik Soeharto yang memimpin secara otokratis. TNI menjadi tonggak politik Orde Baru dan lebih setia pada personalitas Soeharto serta meninggalkan jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional yang profesional. TNI menjadi milik dan alat Golkar dan tidak menjadi milik seluruh rakyat lagi, serta tidak bersifat nasional. Sangat luasnya peran sosial politik TNI pada masa itu mengakibatkan kehidupan demokrasi

tidak berkembang dan tentara tidak bersikap profesional lagi. Semua ini didukung karena adanya undang-undang yang mengangkat militer sebagai pelindung rakyat dalam segala bidang.

5.1.1 Peran Dwi Fungsi ABRI

Pada zaman Demokrasi Liberal terjadi politik pecah belah dikalangan militer yang bertujuan untuk mencegah ABRI menjadi satu kesatuan yang kompak. Puncak dari pertentangan yang terjadi di ABRI adalah terjadinya pemberontakan G 30 S/PKI. Hambatan utama bagi integrasi ABRI pada masa Orde Lama yaitu terdapatnya divergensi dan rivalitas antar angkatan. masalah-masalah pembinaan territorial, doktrin, kekaryaan, pressure group dan intelijen merupakan bahan bagi timbulnya divergensi dan persaingan tersebut (Sanit, 1998: 42). Melihat kenyataan tersebut pemerintah Orde Baru mencoba mengatasi masalah tersebut dengan tiga macam pendekatan. Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu pendekatan mental, pendekatan doktrin dan pendekatan organisasi. Usaha-usaha yang dilakukan oleh orde baru merupakan kewajiban dari penguasa pasca soekarno yaitu pemulihan bagian keamanan negara.

A. Pendekatan Mental

Cara pendekatan mental yang dilakukan dalam upaya integrasi ABRI bertujuan untuk menciptakan perwira-perwira baru yang telah mempunyai mental dan fisik telah terintegrasi. pembentukan perwira-perwira penerus yang telah terintegrasi dilakukan dengan cara pembentukan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI). Gagasan pembentukan AKABRI pertama kali dicetuskan oleh Jenderal Gatot Subroto dan baru terlaksana secara formal pada tahun 1965 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden/ Panglima Tertinggi ABRI no. 155 tahun 1965 tanggal 16 Juni 1965

tentang berdirinya Akademi Angkatan Bersenjata yang merupakan sumber utama Perwira Jabatan ABRI. Naskah rencana realisasi AKABRI terdiri dari sebelas bab, diantaranya yang paling fundamental adalah mengenai falsafah pendidikan ABRI, tujuan, system, dan metode. Falsafah pendidikan ABRI adalah landasan idiil bagi pendidikan ABRI adalah Pancasila. Pada tanggal 5 Oktober 1966 Presiden menyatakan dengan resmi berdirinya AKABRI dan melantik Komandan Jenderal Akabri pertama Laksamana Muda Rachmat Sumengkar (AL) dan wakil komandan Marsekal Muda (AU) TNI Suharnoko Harbani.

Pada tanggal 26 Januari 1967 diresmikan Akabri Bagian Umum dengan mengambil tempat bagian Darat Magelang, Akabri bagian Darat di Magelang, Akabri bagian Laut di Surabaya, Akabri bagian Udara di Yogyakarta, dan Akabri bagian Kepolisian di Sukabumi. Akabri memegang teguh panji-panji yang memuat semboyan Bhineka Eka Bhakti (Berbeda-beda Satu Bakti). Pada Pendidikan lanjutan perwira, integrasi dimulai pada tanggal 28 Desember 1963 dalam taraf Afiliasi Antar Sekolah Staf dan Komando (Sesko) yang kemudian menjadi dewan antar Sesko yang diketuai Mayor Jenderal Suwanto. Tugas dewan adalah pembinaan afiliasi di bidang instruksi, penelitian dan pengembangan kurikulum gabungan.

B. Pendekatan Doktrin

Pendekatan kedua yang ditempuh dalam usaha integrasi ABRI adalah pendekatan Doktrin dimana pada saat sebelum integrasi masing-masing mempunyai sebuah semboyan tersendiri seperti TNI AD dengan doktrin TRI UBAYA CAKTI (Tiga Tekad Sakti), TNI AL dengan doktrin EKA CASANA JAYA (Satu Doktrin yang Menang), TNI AU dengan doktrin SWA BHUANA PAKSA (Sayap Tanah Air)

dan polri dengan doktrin TATA TENTREM KERTA RAHARDJA (tanpa keamanan tidak mungkin masyarakat berkarya produktif, tanpa karya jangan harap ada raharja/kesejahteraan). Dari doktrin-doktrin tersebut terlihat kecondongan masing-masing angkatan untuk menunjukkan kekuatan seperti TNI AD menonjolkan wawasan buana, TNI AL menitikberatkan wawasan bahari dan TNI AU menekankan pada wawasan dirgantara. Dari doktrin-doktrin tersebut menjadi persaingan tersendiri dari tiap-tiap angkatan di ABRI. Hal tersebut yang menyebabkan membahayakan kesatuan ABRI dan negara. Atas prakarsa pimpinan Hankam pada tanggal 21 September sampai 17 Oktober diadakan pra seminar Hankam. Pada seminar Hankam yang dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 21 November 1966 berhasil mencetuskan doktrin perjuangan ABRI yang bernama Catur Darma Eka Karma serta Wawasan Nusantara Bahari. Doktrin Catur Darma Eka Karma (Cadek) merupakan hasil penelitian dan penyempurnaan hasil Pra seminar Hankam sebagai usaha integrasi konsepsi dan doktrin dari departemen veteran, Lemhans, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan kepolisian. Dengan adanya doktrin Cadek maka perbedaan-perbedaan yang tajam antar angkatan berhasil ditumpulkan.

C. Pendekatan Organisasi

Langkah ketiga dalam upaya integrasi ABRI adalah pendekatan organisasi. Organisasi adalah suatu alat untuk melaksanakan tugas pokok yang telah ditentukan. Permasalahan yang timbul di tubuh ABRI sebelum integrasi adalah terdapat enam badan Hankam yang masing-masing menjalankan fungsi serupa atau hampir serupa, sehingga pikiran, tenaga, dana, dan daya digunakan secara percuma. Keenam badan itu adalah Komando Operasi Tertinggi (KOTI), Kompartemen Hankam, Departemen Angkatan Darat, Departemen Angkatan Udara,

Departemen Angkatan Laut dan Departemen Angkatan Kepolisian. Pada tahun 1967 dikeluarkan keputusan Presiden No. 132 tahun 1967 yang isinya menertibkan pembagian fungsional angkatan. Pemegang kekuasaan tertinggi ABRI adalah Presiden dibantu oleh Menteri Pertahan dan Keamanan. Sesuai dengan keputusan Presiden No. 132/1967 Maka ABRI terdiri atas:

1. Angkatan Darat
2. Angkatan Laut
3. Angkatan Udara
4. Angkatan Kepolisian

Struktur tersebut juga menjelaskan bagaimana kedudukan Menteri Hankam. Menteri Hankam adalah seorang perwira Tinggi ABRI yang kedudukannya merangkap sebagai Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab).

Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah orde baru untuk mencegah persaingan antar angkatan dilakukan dengan tiga cara yaitu pendekatan mental, pendekatan doktrin dan pendekatan organisasi. Usaha yang dilakukan pemerintah orde baru dalam inetgrasi ABRI selain untuk mencegah terjadinya persaingan antar angkatan juga sebagai upaya untuk mengontrol kekuatan ABRI dan juga menjaga kekuasaannya. Hal ini dapat dilihat dari panglima-panglima yang mengontrol komando ABRI adalah para Jenderal yang setia kepada Soeharto seperti Maraden Pangabean. Para perwira yang tidak sejalan dengan kebijakan Soeharto akan disingkirkan secara perlahan-lahan yaitu dengan cara memberikan jabatan-jabatan yang kurang strategis. Para Perwira yang tidak sepaham dengan Soeharto seperti H.R. Dharsono, Kemal Idris dan Sarwo Edhi Wibowo. Dari penjelasan ini dapat kita lihat bagaimana tujuan yang

sebenarnya mulia untuk menghilangkan persaingan angkatan-angkatan dalam ABRI disalahgunakan untuk kepentingan penguasa Orde Baru.

5.1.2 Langkah-langkah Pertama Pembangunan ABRI

Selama Pelita I (1968-1973) pemerintah belum mampu untuk membangun sektor Hankam/ABRI dan walaupun ada pembangunan di sektor tersebut adalah sangat terbatas sekali. Kegiatan pembangunan ABRI baru pada Pelita II (1974-1979). Tersusun dalam program Rencana Strategis Hankam I (Renstra Hankam I), yang pelaksanaannya dijadualkan dari tahun ketahun sesuai dengan anggaran belanja yang diperoleh Departemen Hankam. Renstra Hankam II mencakup periode 1979/1984, bertujuan mewujudkan landasan kuat untuk meningkatkan pembangunan.

Ada 4 kebijakan Pertahanan Keamanan Nasional (Hankamnas) yang telah digariskan, yang meliputi :

1. Kepentingan Hankamnas adalah keamanan jalannya pembangunan nasional.
2. Tujuan Hankamnas:
 - 1) Menjamin keamanan dalam negeri dan turut serta memelihara perdamaian dunia, khususnya di kawasan Asia Tenggara.
 - 2) Mengamankan seluruh hak milik nasional, bukan hanya mengamankan unsur-unsur fisik daripada hak milik nasional, melainkan juga semua nilai yang telah mendapat kesepakatan seluruh Rakyat Indonesia, yaitu :
 - a) Kemerdekaan Nasional berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945
 - b) Pancasila
 - c) Tujuan Nasional

- d) Konstitusi yang sah , UUD 1945
- e) Semua hasil perjuangan nasional selama ini pada bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan Hankam
- f) Integritas Negara dan keutuhan wilayah negara dari Sabang sampai Merauke.

Kebijaksanaan Hankamnas adalah mencegah dan menangkal gangguan terhadap keamanan, perang dalam berbagai bentuk yang mungkin dilaksanakan terhadap Indonesia, termasuk perang terbatas. Apabila penangkalan tidak berhasil mengatasi gangguan terhadap keamanan dalam negeri, menghalau atau menghancurkan musuh dengan mendasarkan pada kemampuan sendiri.

Strategi Hankamnas yang ditempuh adalah membangun kemampuan keamanan rakyat semesta dengan meniadakan kerawanannya dengan membangun Angkatan Perang dengan kekuatan siap yang kecil dan cadangan yang cukup serta Kepolisian RI yang cukup.

Tujuan Pembangunan Hankamnas pertama mewujudkan daya-tangkal, yaitu kekuatan yang memberikan keyakinan kepada setiap pihak yang mempunyai maksud-maksud memusuhi negara dan Bangsa Indonesia dan merencanakan melakukan agresi dengan cara apapun juga, bahwa ia tidak akan dapat mencapai tujuan atau maksudnya.

Sasaran pembangunan adalah ABRI yang kecil sebagai inti dari kekuatan fisik Hankamnas dengan kualitas yang tinggi baik mental-moril, fisik-materiil maupun kemampuan teknis-nya, didukung oleh kekuatan rakyat yang sebagian sudah mulai tersusun, terlatih dan berfungsi dalam membantu pelaksanaan tugas ABRI dan tersedianya prasarana produksi dan pemeliharaan bagi sebagian alat peralatan Pertahanan dan Keamanan.

5.1.3 Dwi Fungsi ABRI

Di Indonesia, militerisasi build-in melalui Dwifungsi hadir dalam dua wajah yaitu Dwifungsi teritorial dan struktural. Dwifungsi teritorial terwujud dalam bentuk struktur birokrasi sipil dan militer yang hirarkis dan paralel dari pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/ kota, kecamatan sampai kelurahan/ desa. Mendagri adalah pengendali hirarki birokrasi sipil yang bertanggungjawab kepada presiden paralel dengan hirarki birokrasi sipil adalah hirarki militer dari Dephankam/Mabes TNI, Kodam, Korem, Kodim, Koramil dan Babinsa. Menhankam dan Panglima TNI adalah pengendali utama hirarkhi militer yang bertanggungjawab pada presiden. Militer juga nimbrung dalam pengendalian pemerintahan di tingkat kabupaten dengan tampil dalam Muspida yang terdiri dari Bupati, Dandim, Kapolres, Kajari, dan Kepala Pengadilan. Di kecamatan juga ada Muspika yang memberi ruang bagi Danramil dan Kapolsek untuk ikut mengontrol pemerintah dan rakyat.

Dwifungsi skruktural hadir dalam bentuk kekaryaan TNI/Polri atau keterlibatan mereka dalam jabatan sipil. Hampir semua jabatan sipil yang strategis dimasuki militer baikdi wilayah eksekutif (dari gubernur sampai dengan lurah/ kepala desa) maupun legislatif (MPR, DPR sampai DPRD II). Sebagai contoh dari Dwi Fungsi ABRI adalah pada jabatan Wakil Gubernur Timor-timur adalah Kolonel Infantri Suryo Prabowo, Bupati covalima Kolonel Infantri Herman Sediono. Dalam birokrasi sipil terdapat pula Ditjen Depdagri, Ditsospol dan Kantor Sospol sebagai aparat intelejen sipil dan aparat ideologis untuk melakukan indoktrinasi kepada masyarakat dan regulasi terhadap aktivitas politik dan sosial. Dwifungsi ABRI tidak hanya merambah bidang politik dan kemasyarakatan, tapi juga sampai bidang ekonomi. Salah satu bentuk konkretnya berupa “premanisme”. Dwifungsi menjadi ancaman serius bagi demokratisasi keamanan dan bahkan stabilitas sosial-politik. Kerangka analisis ini bertolak belakang dengan ideologisasi Dwifungsi ABRI yang justru mengandaikan ABRI

sebagai stabilisator dan dinamisator. Meski pada masa Orde Baru stabilitas nasional relatif mapan, tapi bersifat semu karena diikuti dengan matinya demokrasi, merajalelanya kekerasan, dan kuatnya supremasi militer, sementara elemen-elemen sipil dalam posisi lemah. Militerisasi telah merambah ke pedesaan sehingga penguatan masyarakat sipil tidak boleh hanya berkiblat ke perkotaan. Penguatan di desa harus mendapat perhatian serius karena: pertama, masyarakat desa selalu termarginalisasi sehingga sulit bagi mereka untuk bangkit tanpa difasilitasi oleh pihak lain; kedua, terisolirnya desa dari gerakan demiliterisasi yang “bias kota”.

1. Konsep Dwifungsi ABRI

Pada dasarnya, konsep dwifungsi ABRI tidak bisa dilepaskan dari perkembangan sistem ketatanegaraan dan sistem politik di Indonesia. Keberadaan ABRI sebagai kekuatan sosial dan politik yang telah melekat sejak kelahirannya, secara nyata memang telah diterima oleh rakyat, karena peranannya memang secara nyata diperlukan bagi kelangsungan sistem kenegaraan dan sistem politik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut ditunjukkan oleh pelbagai peranan ABRI dalam menghadapi situasi-situasi genting, Mulai dari perang mempertahankan kemerdekaan hingga penumpasan G30S/PKI. Dalam menghadapi situasi-situasi genting itu, ABRI telah memainkan peranannya dalam bidang politik. Sebagai contoh ialah Instruksi Bekerja Pemerintah Militer seluruh Jawa No. I/MBKD/1948 dari Kolonel Nasution.

Konsep Dwifungsi ABRI sendiri dipahami sebagai “jiwa, tekad dan semangat pengabdian ABRI, untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka penciptaan tujuan nasional,

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.” Berangkat dari pemahaman tersebut, ABRI memiliki keyakinan bahwa tugas mereka tidak hanya dalam bidang hankam namun juga non-hankam. Sebagai kekuatan hankam, ABRI merupakan suatu unsur dalam lingkungan aparatur pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Sebagai kekuatan sosial, ABRI adalah suatu unsure dalam kehidupan politik di lingkungan masyarakat yang bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional.

Lebih lanjut mengenai ABRI sebagai kekuatan sosial, setidaknya ada dua fungsi yang dimiliki oleh ABRI. Fungsi tersebut ialah fungsi stabilisator dan fungsi dinamisator. Identitas ABRI sebagai pejuang dan kemanunggalannya dengan rakyat secara otomatis mendorong serta menjadikan ABRI sebagai dinamisator dan stabilisator dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Sejarah mencatat bahwa ABRI telah membuktikan kedua fungsinya dalam tindakan-tindakan berikut ini.

1. ABRI sebagai dinamisator :
 - 1) Kemampuan ABRI untuk berkomunikasi dengan rakyat, untuk merasakan dinamika masyarakat, dan untuk memahami serta merasakan aspirasi serta kebutuhan-kebutuhan rakyat, memungkinkan ABRI untuk secara nyata membimbing, menggugah dan mendorong masyarakat untuk lebih giat melakukan partisipasi dalam pembangunan.
 - 2) Kemampuan tersebut dapat mengarah kepada dua jurusan. Di satu pihak hal tersebut merupakan potensi nyata ABRI untuk

membantu masyarakat menegakkan asas-asas serta tata cara kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk juga rencana-rencana serta proyek-proyek pembangunan. Di lain pihak hal itu menyebabkan ABRI dapat berfungsi sebagai penyalur aspirasi-aspirasi dan pendapat-pendapat rakyat.

- 3) Untuk dapat lebih meningkatkan kesadaran nasional dan untuk dapat mensukseskan dan untuk dapat mensukseskan pembangunan, diperlukan suatu disiplin sosial dan disiplin nasional yang mantap. Oleh karena disiplin ABRI bersumber pada Saptamarga dan Sumpah Prajurit, sehingga secara masyarakat, maka ABRI dapat berbuat banyak dalam rangka pembinaan serta peningkatan disiplin nasional tersebut.
- 4) Sifat ABRI yang modern serta penguasaan ilmu dan teknologi serta peralatan yang maju, memberikan kemampuan kepada ABRI untuk juga memelopori usaha-usaha modernisasi.

2. ABRI sebagai stabilisator :

- 1) Kemampuan ABRI untuk berkomunikasi dengan rakyat, untuk merasakan dinamika masyarakat dan untuk memahami aspirasi-aspirasi yang hidup dalam masyarakat, membuat ABRI menjadi salah satu jalur penting dalam rangka pengawasan sosial.
- 2) Kesadaran nasional yang tinggi yang dimiliki oleh setiap prajurit ABRI merupakan suatu penangkal yang efektif terhadap pengaruh sosial yang bersifat negatif dari budaya serta nilai-nilai asing yang kini membanjiri masyarakat Indonesia.
- 3) Sifat ABRI yang realistis dan pragmatis dapat mendorong masyarakat agar dalam menanggulangi masalah-masalah berlandaskan tata pilar yang nyata dan berpijak pada kenyataan situasi serta kondisi yang dihadapi, dengan mengutamakan nilai

kemanfaatan bagi kepentingan nasional. Kemudian rakyat akan dapat secara tepat waktu menentukan prioritas-prioritas permasalahan dan sasaran-sasaran yang diutamakan.

- 4) Dengan demikian akan dapat dinetralisasi atau dikurangi ketegangan, gejolak-gejolak dan keresahan-keresahan yang pasti akan melanda masyarakat yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan dan karenanya mengalami perubahan sosial yang sangat cepat.

Satu aspek yang sangat esensial dalam memahami dwifungsi ABRI adalah pemahaman kita mengenai profesionalisme militer (ABRI). Dalam hal ini, terdapat dua aliran profesionalisme militer, yaitu profesionalisme lama dan profesionalisme baru. Profesionalisme lama sendiri berpijak pada keyakinan bahwa militer hanyalah berperan dalam urusan hankam. Di sisi lain, profesionalisme baru menawarkan sebuah pemahaman baru dimana militer tidak hanya berperan dalam bidang hankam, namun juga non-hankam.

Konsep profesionalisme baru pada dasarnya menganggap negara-negara berada dalam keadaan perang semesta. Perang semesta sendiri dipahami sebagai keadaan dimana negara tidak hanya menghadapi ancaman yang datang dari luar, namun juga dari dalam. Permasalahan sosial dan politik adalah contoh ancaman dari dalam negeri. Untuk memenangkan perang tersebut, diperlukan sebuah strategi dimana seluruh potensi yang ada dalam sebuah negara bisa dimaksimalkan. Kunci dari strategi itu adalah bersatu-padunya dan interaksi yang dinamis antara keamanan nasional dengan pembangunan nasional, atau tidak terpisahnya dimensi hankam dan dimensi non-hankam dalam pengelolaan negara. Berdasar pada kunci dari strategi tersebut, militer (ABRI) menjadi kelompok yang diyakini mampu mengemban tugas untuk memberikan kemenangan dalam perang semesta karena kecakapannya baik dalam bidang hankam maupun non-hankam. Ketika kita melihat strategi dari ABRI sendiri,

kita akan menemui bahwa mereka menganut konsep pertahanan semesta. Di samping itu, kita bisa melihat bahwa hal ini sangat sesuai dengan konsep Dwifungsi ABRI.

Dalam pelaksanaannya, Dwifungsi ABRI didasarkan pada beberapa undang-undang yang menjadi landasan legal formal berlakunya konsep tersebut. Pengaturan Dwifungsi ABRI dalam undang-undang sendiri baru dimulai pada era Orde Baru, walaupun sebelumnya beberapa peraturan perundangan telah menyinggung kedudukan ABRI sebagai golongan fungsional seperti umpamanya UU No. 7 Tahun 1957 tentang Dewan Nasional, UU No. 80 Tahun 1958 tentang Dewan Perancang Nasional, dan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960. Pada era orde baru, undang-undang yang mengatur Dwifungsi ABRI ialah Ketetapan MPRS Nomor XXIV/MPRS/1966, yang kemudian disusul oleh UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 16 Tahun 1969, Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, dan UU no. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI.

Adapun penjelasan lebih lanjut tentang beberapa pasal tersebut adalah sebagai berikut :

UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang antara lain mengatakan :

“Meningat Dwifungsi ABRI sebagai alat negara dan kekuatan sosial harus kompak bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal Pancasila dan UUG 1945 yang kuat dan sentosa.”

Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara mengukuhkan Dwifungsi ABRI sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional dengan kalimat :

BAB 6. PENUTUP

7.1 Simpulan

Keterlibatan militer dalam peran sosial politik sudah dimulai sejak Indonesia merdeka. Dari perjalanan sejarah Indonesia, maka sangat jelas terlihat bahwa ABRI memiliki komitmen yang begitu kuat pada bidang sosial politik terutama pasca kemerdekaan. Di dalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945, tidak menyebutkan secara jelas dan tidak ada ketentuan yang mengharuskan ABRI untuk mengatur dibidang hankam saja. Dengan demikian ABRI dapat bergerak dibidang politik, sosial dan ekonomi.

Militer mempunyai peranan di bidang sosial politik, disamping tugas utamanya sebagai kekuatan pertahanan keamanan. Fungsi tersebut sesuai dengan kepribadian Indonesia yang berdasarkan Pancasila, menganut paham kekeluargaan di dalam mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Militer di bidang sosial politik merupakan bentuk peran yang bertujuan meredakan permasalahan-permasalahan Negara dan mencapai stabilitas nasional. Ideologi nasional militer menjadi pendukung peran tersebut untuk menangkal setiap kejadian yang mengarah pada masalah disintegrasi bangsa, serta berusaha memperbaiki kehidupan bangsa dan negara di segala bidang pemerintahan. Kedua fungsi tersebut kemudian melembaga menjadi dwifungsi ABRI. Konsep ini merupakan dua peran yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya.

Di masa Orde Baru, militer berperan dominan di pemerintahan berdasarkan konsep Dwifungsi ABRI yang berkembang luas saat itu. Militer sebagai kekuatan hankam merupakan aparatur negara/pemerintah dengan menjalankan fungsi hankamnas untuk mempertahankan dan mengamankan negara dan bangsa. Sedangkan, sebagai kekuatan sosial politik merupakan salah satu golongan karya untuk aktif dalam segala usaha dan kegiatan masyarakat demi mencapai tujuan nasional dengan mengisi dan membangun negara melalui

jabatan di lembaga-lembaga pemerintahan hal ini didukung dengan adanya keputusan presiden pada waktu itu, presiden berlandaskan dengan undang-undang 1988 yang didalamnya kepengurusan militer adalah jiwa untuk rakyat, jadi militer berhak mengatur keadaan sosial masyarakat, ekonomi bahkan budaya.

Pelaksanaan tugas militer tersebut memerlukan partisipasi aktif dari rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa, sehingga fungsi militer hanya membantu dan menjadi dinamisator dan stabilisator dari proses pembangunan. Ini merupakan tujuan militer di masa Orde Baru. Peranan ABRI/TNI sebagai dinamisator didukung oleh kemampuannya untuk berkomunikasi dengan rakyat, untuk merasakan dinamika masyarakat dan untuk memahami aspirasi-aspirasi yang hidup dalam masyarakat, sedangkan sebagai stabilisator didukung oleh ideologi militer yang berorientasi nasional untuk menciptakan stabilitas bangsa dan negara.

Adanya permasalahan-permasalahan yang dilakukan ABRI dan kepemimpinan soeharto menimbulkan masyarakat penolakan terhadap kepemimpinan soeharto. Banyak masyarakat-masyarakat dan mahasiswa pada tahun 1998 melakukan boikot terhadap kepemimpinan soeharto, mahasiswa menkan presiden untuk mengundurkan diri dari kursi kepimimpinannya. Pergerakan membuahkan hasil presiden soeharto mundur dari jabatannya.

Masa orde baru lengser pada tahun 1998, masyarakat menggap masa setelah orde baru adalah masa reformasi. Dalam proses reformasi ini membuat militer kehilangan jalan, tetapi setelah lambat laun kedudukkan militer di Indonesia jelas dengan tugas, fungsi dan perannya yang tercetus di undang-undang no 34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia. Dalam pengembangan tugas dan fungsi militer di indosia sudah tidak sama dengan masa orde baru. Militer dalam masa orde baru adalah sebagai ketahanan nasional tentara bersenjata yang bertugas mengamankan kedaulatan bangsa. Tugas militer

juga sudah dibedakan, pemecahan antara TNI dan KAPOLRI jelas adanya, Dan tugasnyapun berbeda.

7.2 Saran

1. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Bagi mahasiswa sejarah penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan pengetahuan tentang peranan militer di Indonesia dalam bidang sosial politik.
3. Bagi peneliti sejarah penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya yang lebih luas dan mendalam untuk mengupas tema yang sama.
4. Bagi almamater penelitian ini merupakan salah satu perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Darma Penelitian dan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi kajian ilmu pengetahuan di perpustakaan pusat Universitas Jember.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Caforio, G. 2006. *Handbook of the Society*. NY: Springer

Departemen Pertahanan Keamanan. 1978. *Dwifungsi dan Kekayaan ABRI*. Jakarta: Sospol Hankam

Bakti, I. Nusa. 2000. *Hubungan Baru Sipil-Militer*, Jakarta: Kompas

Britton, Peter. 1966. *Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia*. Jakarta LP3ES.

Fattah, A. 2005. *Demiliterisasi Tentara Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta.

Haris, S. dkk. 1966. *Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Henry, dkk. 1999. *Panggung Sejarah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Ihsan, Bakir.A. 2013. *Pemimpin Dipuji dan Dicaci “Realitas Demokrasi Indonesia Kini*. Jakarta: PT. Mizan Publika.

Imawan, R. 1997. *Membedah Politik Orde baru*. Yogyakarta: Pustaka pelajar

Kadi, S. 2000. *TNI-AD Dahulu, Sekarang, dan Masa Depan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Karim, M. 1989. *Peranan ABRI dalam Politik dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan Politik di Indonesia 1965-1979*. Jakarta: CV Haji Masagung.

Kartono, K. 1996. *ABRI dan Permasalahannya (Pemikiran Refleksi Peranan ABRI di Era Pembangunan)*. Bandung: Mandar Mujur.

Kontras, T.2005. *Politik Militer dalam Transisi Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Kontras.

Kristiadi, J (ed). 1999. *Hubungan Sipil-Militer dan Bisnis Militer Orde Baru*, Bandung: Remaja Rosda Karya

- Muhaimin, Y.A. 1982. *Perkembangan militer dalam politik di indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah mada university press.
- Nasution, A. H. 1918. *Memenuhi Panggilan Tugas Kenangan Masa Gerilya*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Nasution, A. H. 1971. *Kekarjaan ABRI*. Jakarta: Seruling masa.
- Nasution, A. H. 1984. *Memenuhi Panggilan Tugas Masa Pancaroba Kedua*. Jakarta: Gunung Agung.
- Nasution, A. H. 1988. *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 8 Masa Pemancangan Orde Pembangunan*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Nordlinger, E. 1994. *Militer dalam Politik Kudeta Dalam Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Perlmutter, A. 1984. *Militer Politik*. Jakarta: CV Rajawali.
- Ricklefs, M. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Sanit, A. 2002. *Sistem Politik Indonesia “Kestabilan, Peta dan kekuatan Politik Dan Pembangunan”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Said, S. 2013. *Dari Gestapu ke Reformasi Serangkaian Kesaksian*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Samego, dkk. 1998. *Bila Abri Menghendaki Desakan Kuat Reformasi Atas Konsep Dwifungsi ABRI*. Bandung: Mizan.
- Samego, I. 2000. *TNI di Era Perubahan*. Jakarta: Erlangga.
- Shaw, M. 1991. *Bebas dari Militer Analisis Sosiologi Atas Kecenderungan Masyarakat Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Schroorl. J. W. 1981 *Modernisasi (Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang)*. Jakarta: PT. Gramedia.

Soebijono, dkk. 1997. *Dwifungsi ABRI Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajahmada Univercity Press.

Pratiknya. A. W. 1999. *Pandangan dan Langkah Reformasi BJ. Habibie*. Jakarta: Rajawali Press

Tambunan T. 1995. *Krisis ekonomi dan masa depan reformasi*. Jakarta: LPFE-UI

Tim Peneliti PPW-LIPI. 1999. *Tentara Mendamba Mitra*, Bandung: Mizan.

Pusbintal ABRI. 1991. *pusat pembinaan mental*. Jakarta: Mabes Tni

Universiatas Jember 2010. *Pedoman Penulisan Karya ilmiah*. Jember: Universitas Press.

Urbaningrum, A. 1999. *Ranjau-Ranjau Reformasi “ Potret Konflik Pasca Kejatuhan Soeharto”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

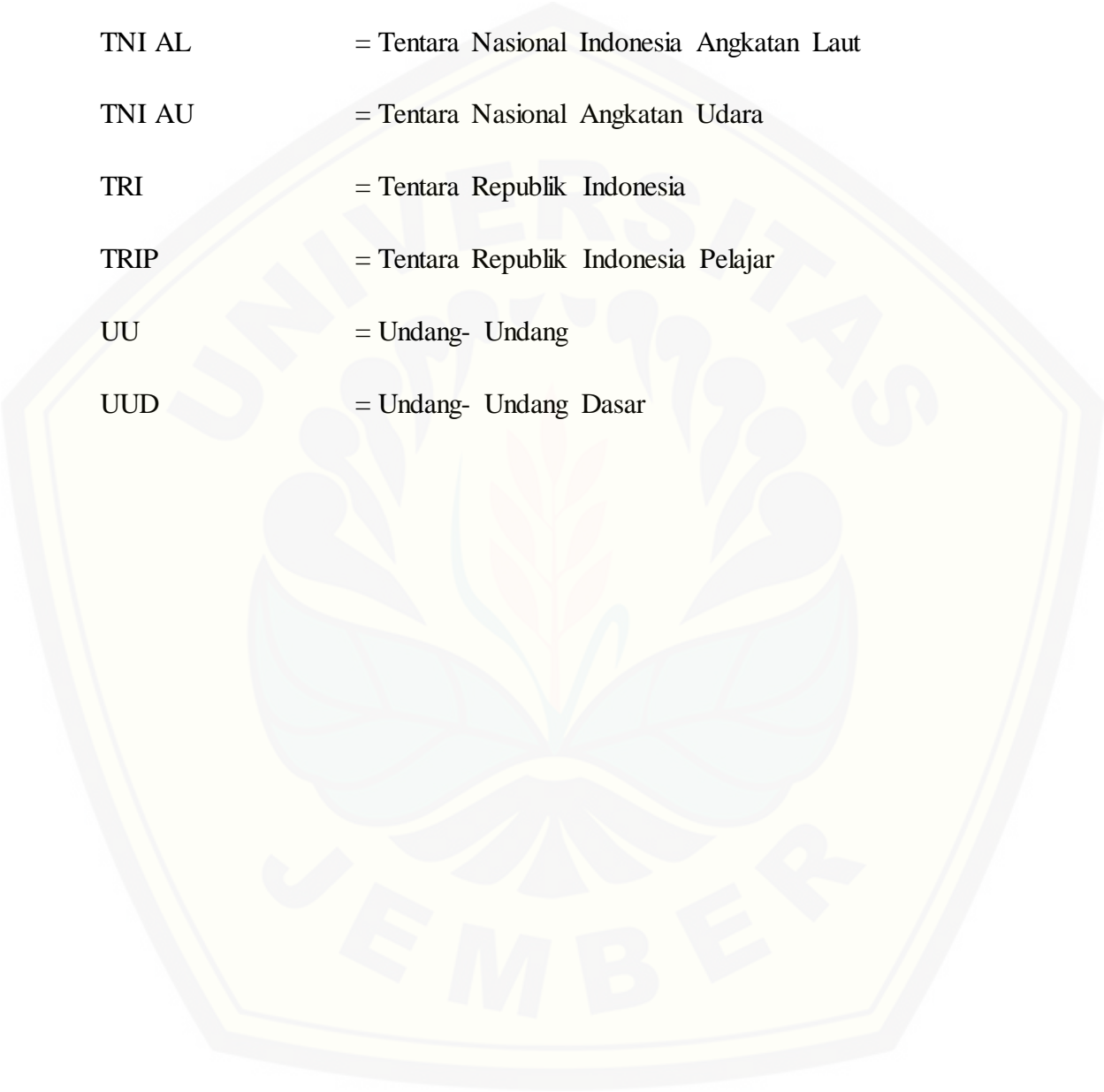
Wahid, A. 2010. *Gusdur Menjawab Perubahan Zaman*. Jakarta: Kompas.

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	= Angkatan Bersenjata Indonesia
AKABRI	= Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
BABINSA	= Bintara Pembina Desa
BKR	= Badan Keamanan Rakyat
BPKKP	= Badan Penolong Keluarga Korban Perang
CADEK	= Catur Darma Eka Karma
DANDIM	= Komandan Distrik
DEPHANKAM	= Departemen Pertahanan dan Keamanan
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GOLKAR	= Golongan Karya
G30S/PKI	= Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia
HAM	= Hak Asasi Manusia
HANKAM	= Pertahanan Keamanan
KAMI	= Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
KAJARI	= Kepala Kejaksaan Negeri
KAPOLRES	= Kepala Kepolisian Resor
KAPPI	= Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia



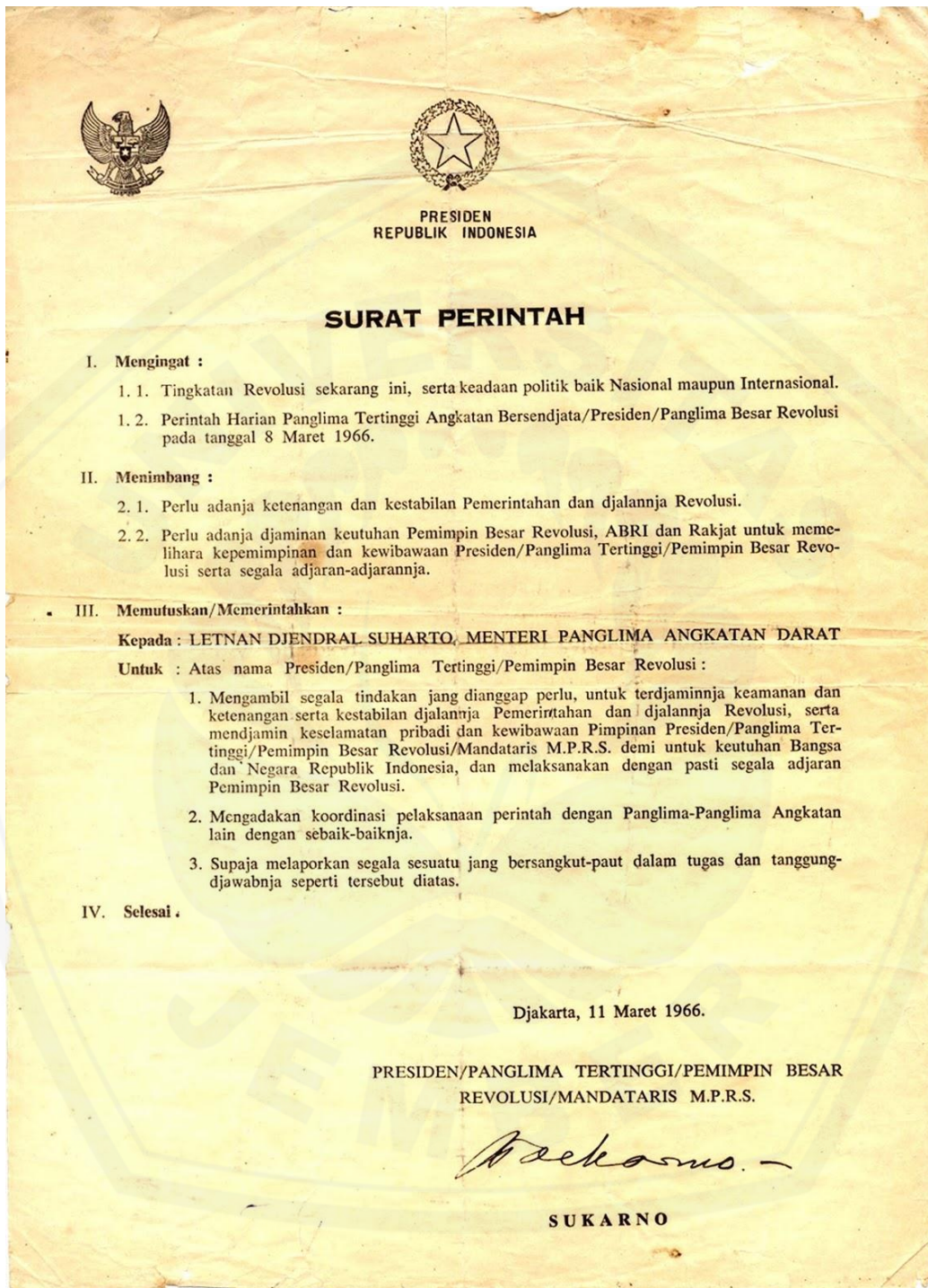
KASAD	= Kepala Staf Angkatan
KOTI	= Komando Operasi Tertinggi
KODAM	= Komando Daerah Militer
KOREM	= Komando Resort Militer
KODIM	= Komando Distrik Militer
KORAMIL	= Komando Rayon Militer
KSAP	= Kepala Staf Angkatan Perang
KSAD	= Kepala Staf Angkatan Darat
MABES	= Markas Besar
MPR	= Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPRS	= Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
MILITER	= Angkatan bersenjata dari suatu Negara atau segala
OKD	= Organisasi Keamanan desa
PANGAB	= Panglima Angkatan Bersenjata
PELITA	= Pembangunan Lima Tahun
PKI	= Partai Komunis Indonesia
POLRI	= Kepolisian Republik Indonesia
SUPERSEMAR	= Surat Perintah Sebelas Maret
TKR	= Tentara Keamanan Rakyat



TNI	= Tentara Nasional Indonesia
TNI AD	= Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TNI AL	= Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TNI AU	= Tentara Nasional Angkatan Udara
TRI	= Tentara Republik Indonesia
TRIP	= Tentara Republik Indonesia Pelajar
UU	= Undang- Undang
UUD	= Undang- Undang Dasar

Matrik Penelitian

Topik	Judul Penelitian	Jenis Dan Sifat Penelitian	Permasalahan	Sumber Data	Metode Penelitian
1	2	3	4	5	6
Sejarah Militer	Dinamika Peranan Militer Di Indonesia Dalam Bidang Sosial Politik Tahun 1966-2004	a. Jenis Penelitian: • Penelitian Deskriptif b. Sifat Penelitian: • Penelitian Studi Pustaka	1. Bagaimana dinamika tugas pokok dan fungsi militer di Indonesia Tahun 1966-2004? 2. Bagaimana peranan dibidang sosial militer di Indonesia Tahun 1966-2004?	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang TNI • Buku-buku yang berkaitan dengan peranan militer dalam bidang sosial politik • Dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Primer 2. Sumber Sekunder 	Metode Penelitian Sejarah dengan langkah-langkah: <ol style="list-style-type: none"> a. Heuristik b. Kritik c. Interpretasi d. Historiografi Pendekatan: Sosiologi Politik Teori: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Kebijakan 2. Teori Kepemimpinan



Sumber: <https://rajaagam.wordpress.com/2012/03/11/supersemar-surat-resmi-tanpa-nomor-2>



Gambar 1: Laskar Badan Keamanan Rakyat (BKR) dengan bambu runcing sebagai senjata

<http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/58/Badan-Keamanan-Rakyat-BKR>



Gambar 2: Urip Sumoharjo (kiri) Bersama Jenderal Sudirman.

<http://www.biografiku.com/2015/12/biografi-urip-sumoharjo-pahlawan-indonesia.html>



(Foto: Arsip Nasional) Gambar 3: Pembentukan BKR tanggal 22 Agustus 1945

<http://www.batamtoday.com/berita32327-22-Agustus-1945,-Badan-Keamanan-Rakyat-Resmi-Dibentuk.html>



Gambar 4 : Menjelang Perubahan nama TRI menjadi TNI -1947.

<http://kebumen2013.com/kilas-balik-5-oktober-sebagai-hari-lahirnya-tentara-nasional-indonesia-tni>



Gambar 5: Presiden Soekarno dalam masa peralihan TRI menjadi TNI di Jawa Tengah 1947

<http://kebumen2013.com/kilas-balik-5-oktober-sebagai-hari-lahirnya-tentara-nasional-indonesia-tni/>



Gambar 6: Berbicara tentang Supersemar, Sukarno bercengkrama dengan Soeharto
rajaagam.wordpress.com/2012/03/11/supersemar-surat-resmi-tanpa-nomor-2/



Gambar 7: (Proses Penyerahan Surat perintah 11 maret 1966 kepada Mayor jendral soeharto)

<http://www.artikelsiana.com/2014/08/proses-lahirnya-orde-baru.html>



Gambar 8: Soeharto Menjadi Presiden Indonesia Kedua

<http://www.beritaseri.com/wp-content/uploads/apakah-soeharto-masih-dirindukan.jpg>



Gambar 9: Soeharto akhirnya resmi dilantik menjadi Presiden RI pada [27 Maret 1968](#).

id.wikipedia.org/wiki/Soeharto



Gambar 10: Presiden Suharto dan istrinya Siti Hartinah dengan putra dan putri mereka.

id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Suharto_family.jpg



Gambar 11: Pada tanggal 21 Mei 2012. Akhirnya Soeharto turun tahta setelah lebih dari 32 tahun berkuasa

drkonline.org/2015/07/relasi-tentara-abri-dengan-soeharto.html



Gambar 12: TNI pada masa sekarang

<http://kebumen2013.com/kilas-balik-5-oktober-sebagai-hari-lahirnya-tentara-nasional-indonesia-tni/>